

Dr. Diana Rapisari, M.M.
Prof. Dr. Ir. Pribadiyono, MS.
Dr. Suwitho, M.Si.

litrus.

Pemberdayaan **PEREMPUAN** *di Era Digital*

Eksistensi Pengembangan
Dharma Wanita Persatuan



Pemberdayaan **PEREMPUAN** *di Era Digital*

Eksistensi Pengembangan
Dharma Wanita Persatuan

Dr. Diana Ralitasari, M.M.
Prof. Dr. Ir. Pribadiyono, MS.
Dr. Suwitho, M.Si.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL
Eksistensi Pengembangan Dharma Wanita Persatuan

Ditulis oleh :

Dr. Diana Rapisari, M.M.
Prof. Dr. Ir. Pribadiyono, MS.
Dr. Suwitho, M.Si.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitrus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2024

Perancang sampul: Hasanudiin
Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-623-519-101-0
viii + 200 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2024



PENGANTAR

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dalam konteks Indonesia, peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi semakin mendapat perhatian, dan salah satu organisasi yang berperan aktif dalam hal ini adalah Dharma Wanita Persatuan (DWP). Buku ini, “Pemberdayaan Perempuan di Era Digital: Eksistensi Pengembangan Dharma Wanita Persatuan,” mengeksplorasi bagaimana DWP, sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, beradaptasi dan berkembang di era digital untuk mendukung pemberdayaan anggotanya dan perempuan pada umumnya.

Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang baru bagi perempuan untuk mengakses informasi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Hal ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. DWP, dengan visi dan misinya, telah memanfaatkan TIK untuk memperluas jangkauan program-program pemberdayaan yang mereka miliki. Buku ini menguraikan berbagai inisiatif dan program yang telah dikembangkan oleh DWP untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, seperti pelatihan keterampilan digital, program literasi keuangan, dan pengembangan kewirausahaan.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengadopsi teknologi digital, seperti kesenjangan

digital dan hambatan sosial-budaya. DWP memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini melalui program-program inklusif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai cabang DWP di seluruh Indonesia diangkat dalam buku ini sebagai studi kasus yang menginspirasi.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana organisasi perempuan seperti DWP dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan di era digital. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca, terutama perempuan, untuk lebih percaya diri dalam mengejar peluang di era digital. Lebih dari itu, buku ini menjadi panduan bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami yakin bahwa pemberdayaan perempuan di era digital akan terus meningkat, dan DWP akan tetap menjadi pilar penting dalam mendukung perempuan Indonesia untuk mencapai potensi penuh mereka. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi semua pembaca yang peduli dengan masa depan perempuan dan perkembangan digital di Indonesia.



DAFTAR ISI

Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

BAB II

KONSEP EKSISTENSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	31
Teori Eksistensi.....	31
Pemberdayaan Perempuan	35
Strategi Organisasi.....	39
Reinforcement Theory.....	42

BAB III

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL.....	45
Perilaku Organisasi	45
Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis.....	51
Kompetensi MSDM Unggul	52
Era Digital.....	53
Model Pengembangan Organisasi di Era Digital.....	58
Sinergitas dan Kolaborasi.....	61

BAB IV

MENGENAL ORGANISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL	63
Gambaran Organisasi Dharma Wanita Persatuan	63
Sejarah Dharma Wanita Persatuan	64
Visi, Misi, dan Tujuan	67
Pendanaan dan Masa Berakhirnya Keanggotaan Organisasi	68
Prinsip Penyusunan Rencana Kerja	69
Bidang Pendidikan Organisasi	71
Bidang Ekonomi	87
Bidang Sosial Budaya	109
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	123
Pelaporan E Reporting	130
Kerjasama Multipihak	132
Renstra DWP 2020-2024	133

BAB V

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	137
Eksistensi pemberdayaan perempuan dan kontribusinya pada masyarakat Jawa Timur	137
Peran Anggota terhadap Keberlangsungan Organisasi	153

BAB VI

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL	159
Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan	159
Model Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	169

BAB VII

PENUTUP	181
Daftar Pustaka	187
Biografi Penulis.....	199





PENDAHULUAN

Dalam realitas sosial perempuan seringkali dianggap tidak setara dengan laki laki dalam hal kemandirian mendapatkan penghasilan. Oleh karenanya penting bagi perempuan untuk mempunyai penghasilan sendiri, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap otonominya dalam pengambilan keputusan (Farihah, 2015). Harus diakui permasalahan yang menimpa kaum perempuan terjadi akibat ketidakseimbangan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan. Permasalahan ini menjadi pemikiran semua pihak dengan kapasitasnya agar pemberdayaan perempuan yang dilakukan dapat menunjang serta mempercepat tercapainya kualitas hidup perempuan.

Perubahan ini dipengaruhi oleh tuntutan global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kepedulian bangsa memberikan akses seluas-luasnya pada perempuan untuk beraktivitas di ranah publik (Ahdiah, 2013). Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh dari suatu negara menuntut peran yang utuh dan menyeluruh juga dari kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan (Manembu et al., 2017).

Peran perempuan dalam pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pendidikan yang diperolehnya untuk meningkatkan akses perempuan ke pasar tenaga kerja dan meningkatkan ketrampilan

tertentu, termasuk keahlian di bidang ekonomi dan kepemimpinan (Purnamasari, 2016). Perempuan memiliki peran yang besar dalam mencapai Tujuan Nasional Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59, Tahun 2017 TPB Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam upaya tercapai tujuan yang tertulis dalam Peraturan Presiden tersebut dibutuhkan peran serta perempuan agar dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari lingkungan keluarga. Keberadaan organisasi perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam ilmu pengetahuan. Pemberdayaan perempuan melalui organisasi dapat dikatakan termasuk kedalam gerakan sosial sehingga diharapkan mampu memberikan perubahan dalam kesetaraan gender serta berkontribusi pada pembangunan bangsa (Nurdiyana, 2021)

Kontribusi organisasi perempuan dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan perempuan ditentukan dari perspektif perempuan pada organisasi yang bersinergitas terutama pada aktivitas sosial. Perempuan selalu memainkan peran aktif dan kontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya di masyarakat melalui beragam aktivitas. Efek Pandemi yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun mengakibatkan jumlah pengangguran serta kemiskinan meningkat. Data dari Kemenaker menunjukkan per Oktober 2020 sebanyak 3,56 juta pekerja di phk dan dirumahkan, sedangkan 683,61 ribu pengangguran sampai bulan Agustus 2020 terdampak di Jawa Timur Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, kemiskinan naik 0,97% (BPS, Sept 2020) sedangkan tingkat kemiskinan Jatim naik 1,26% (BPS Jatim, Okt 2020). Hal ini menimbulkan resesi dan darurat kesehatan, belum lagi

diperdalam dengan kondisi demografi di Jawa Timur dimana saat ini kondisi struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif sebanyak 71,6% dari populasi yaitu usia 15-64 Tahun (Bappeda Jatim, 2021). Komposisi penduduk usia produktif yang besar merupakan sumber daya produksi yang akan menggerakkan perekonomian, dan tentunya akan menjadi beban perekonomian manakala penduduk usia produktifnya menjadi tidak produktif dengan kata lain tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dalam artian menjadi pengangguran.

Melibatkan kaum perempuan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pilihan yang wajib dikembangkan dewasa ini, pengarusutamaan gender merupakan kebijakan tepat mengingat kaum perempuan termasuk kaum rentan krisis kemiskinan (Solihah et al., 2019). Kaum perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri di satu pihak dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mempunyai cara untuk dapat menyumbangkan penghasilan bagi keluarga dan menciptakan kemandirian di bidang perekonomian. Peran perempuan dibutuhkan untuk dapat mencetak figur sumber daya manusia di masa depan yang lebih mandiri, kreatif, serta unggul agar tidak lagi hanya mencari pekerjaan sebagai sumber penghasilan tapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau minimal dapat mandiri dalam hal mendapatkan penghasilan.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan generasi

No	Keterangan		
	Generasi	Jumlah (Juta Jiwa)	Persentase
1.	Pre Boomer (Sebelum 1945)	5.03	1.87%
2.	Baby Boomer (1946-1964)	31.01	11.56%
3.	Gen X (1965-1980)	58.65	21.88%
4.	Millennial (1981 – 1996)	69.38	25.87%
5.	Gen Z (1997-2012)	74.93	27.94%
6.	Post Gen Z (setelah 2013)	29.17	29.17%
	Jumlah	268,17	100%

Sumber: Bappeda Jatim, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa yang terjadi dimasa kini adalah bonus Demografi yaitu suatu kondisi dimana struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif dan sangat jarang terjadi dalam sejarah sebuah bangsa. Saat bonus demografi terjadi maka negara mempunyai kesempatan agar pertumbuhan ekonomi negara Indonesia menjadi tinggi dan dapat mewujudkan menjadi negara maju maka penting untuk sebuah negara berbenah. Meski demikian menurut Patria Sjahrir ada tiga tantangan sebelum mencapai generasi emas (detik.com, 2022) yaitu pertama Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja berpendidikan dan berkecakupan tinggi, kedua meningkatkan akses Pendidikan global, serta masalah perubahan iklim yang dapat mengancam kualitas hidup talenta muda. Genrasi millennial memiliki fase terjadinya perkembangan teknologi yang pesat dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat Pendidikan yang lebih baik dari generasi sebelumnya (Panjaitan dan Prasetya, 2017). Karakteristik lain dari generasi millennial adalah kecanduan internet, memiliki rasa percaya diri dan harga diri tinggi serta lebih terbuka dan memiliki toleransi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Kaifi et.al, 2012)

Masa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dimana pengembangan digital serta pemanfaatan internet menjadi lebih umum dipakai dalam segala bidang tentu menciptakan lebih banyak peluang baru. Dibutuhkan inovasi manajemen berbasis teknologi yang memudahkan organisasi untuk berjalan lebih fleksibel, tertata, terintergrasi dan seragam. Konsep masyarakat yang menyeimbangkan atas kondisi sosial melalui sistem yang terintegrasi antara dunia maya dan fisik dibutuhkan untuk memudahkan segala proses pengambilan keputusan, pelayanan public hingga kebutuhan individu tanpa terbelenggu ruang, waktu dan tempat. Dalam mewujudkan *roadmap* dan tujuan pembangunan pemerintah tentu peran perempuan sangat dibutuhkan agar dapat mencetak generasi yang unggul kedepan juga mengedukasi masyarakat serta lingkungan di organisasinya untuk mengikuti perubahan jaman dan beradaptasi.

Organisasi Dharma Wanita Persatuan memiliki arti yaitu Dharma memiliki pengertian berbudi pekerti luhur dan wanita adalah perempuan maka merupakan organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil atau sekarang lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara. Dilatarbelakangi dari premis bahwa di balik pria sukses, terdapat wanita hebat di belakangnya yang selalu memberikan dukungan, maka organisasi ini dibentuk juga dengan harapan terdapat wanita hebat yang berwawasan luas dan dapat mendukung kinerja suami. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima informasi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan kurang, informasi yang diterima dengan baik oleh ibu menjadi bekal dalam pola asuh anak-anaknya (Lailatul & Ni'mah., 2015).

Dharma Wanita Persatuan awalnya terbentuk pada 5 Agustus 1974 didirikan atas prakarsa ibu Tien Soeharto dan hanya beranggotakan istri Pegawai Republik Indonesia. Namun pada era Reformasi 1998 melalui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 7 Desember 1999 berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan yaitu sebagai organisasi beranggotakan istri aparatur sipil negara yang netral dari politik dan independen.

Negara menyadari sepenuhnya bahwa Dharma Wanita Persatuan sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia yang berkewajiban menyukseskan tujuan nasional berdasarkan UUD 1945. Berbagai kegiatan dari bidang sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi merupakan ragam upaya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Tantangan dalam berorganisasi meningkat setiap waktunya, dimana kondisi Pandemi memaksa setiap bidang untuk dapat beradaptasi dengan kondisi aktual dimana pandemi mengubah masa depan peta pasar tenaga kerja, perusahaan mulai mengadopsi teknologi untuk tetap bertahan menjadi digitalisasi dan otomatisasi, pengurangan tenaga kerja, serta mengintensifkan pelatihan serta peningkatan ketrampilan.

Harapan Pemuda Indonesia dapat membantu pemerintah yaitu berfokus pada bidang pengembangan, partisipasi, dan kepemimpinan. Menurut *Executive Summary Indonesian Youth in The 21st Century, United Nations Fund For Population Activities (UNFPA)* ada tiga hal besar prioritas yang harus diperhatikan di masa kedepannya:

Prioritas I:

1. Pendidikan, akses pendidikan di pedesaan dan terpencil
2. Kesehatan, sanitasi, kebersihan pribadi, perilaku beresiko, penyakit baru muncul kembali
3. Kesempatan Ekonomi, akses terhadap peluang ekonomi

Prioritas II:

1. Informasi, komunikasi, Teknologi, belajar, beraktivitas, dan bekerja
2. Kewarganegaraan, menumbuhkan kesadaran berwarga-negara
3. *Safety & Security*, intimidasi keselamatan dan keamanan kerja, pekerjaan dibawah umur dan kekerasan berbasis gender.

Prioritas III: Lingkungan hidup, budaya, dan tradisi.

Keseluruhan prioritas tersebut dapat dikatakan sejalan dengan program kegiatan yang dilakukan di organisasi Dharma Wanita Persatuan meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya.

Menurut menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dikutip dari Detik.com (28 juni 2020) jumlah total ASN di Indonesia mencapai 4,27 juta berarti juga terdapat sekitar 4,27 juta anggota Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia. Dikutip dari Rencana Strategis (Renstra) Dharma Wanita Persatuan tahun 2020-2024 Visi Dharma Wanita Persatuan adalah menjadi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional.

Misi Dharma Wanita Persatuan adalah (1) mewujudkan sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang kompeten dan berdaya saing global, (2) mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, (3) meningkatkan kerjasama multipihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan, dan (4) mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi dan berbasis data.

Keberadaan organisasi Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat turut serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas pokok dan fungsi Dharma Wanita Persatuan adalah (1) melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pekerti yang luhur, dan (2) membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

Kinerja baik Dharma Wanita Persatuan di Provinsi Jawa Timur dibuktikan dari berhasilnya menempati peringkat pertama secara nasional dalam pelaporan program kerja secara online melalui *e-reporting*. Dapat dilihat berdasarkan tabel 1.2 dibawah bahwa secara berturut turut sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur telah berhasil menempati peringkat teratas nasional dengan kriteria jumlah kegiatan DWP terbanyak sehingga dapat dikatakan lebih unggul dari DWP di provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

Tabel 1.2 Peringkat Nasional Dharma Wanita Persatuan Berdasarkan Jumlah E-Reporting Tahun 2017–2021

Peringkat	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jawa Timur 19.143	Jawa Timur 28.053	Jawa Timur 71.624	Jawa Timur 45.622	Sumatera Selatan 76.488
2.	Jawa Tengah 8.406	Jawa Tengah 12.998	Sumatera Selatan 46.627	Sumatera Selatan 22.822	Sulawesi Tengah 42.167
3.	Jawa Barat 2.701	Jawa Barat 5.127	Jawa Tengah 22.009	Sulawesi Tengah 20.559	Jawa Timur 31.050
4.	Kalimantan Timur 2.194	Sulawesi Tenggara 1.870	Sulawesi Tenggara 9.054	Jawa Tengah 20.460	Jawa Tengah 30.797
5.	Lampung 594	Maluku Utara 1.690	Jawa Barat 8.998	Jawa Barat 7.670	Jawa Barat 14.255

Sumber: *lppk.dwp.or.id*, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 didapatkan informasi bahwa pada periode tahun 2017 hingga 2020 kinerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur unggul dalam kategori jumlah pelaporan E Reporting terbanyak dan menempati peringkat pertama. Data yang berbeda didapatkan pada tahun 2021 DWP Provinsi Jawa Timur memperoleh peringkat pelaporan kinerja yang lebih rendah yaitu turun ke peringkat ke tiga dimana hal ini bisa jadi disebabkan karena keterbatasan gerak organisasi karena pandemi di tahun 2021 jumlah paparan di Provinsi Jawa Timur naik cukup signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya di luar Jawa Timur sehingga aktivitas banyak dibatasi dan dilakukan pembatasan wilayah.

Tabel 1.3 Peringkat DWP Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah E-Reporting Tahun 2017–2021

Rangking	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jawa Timur 8.323	Jawa Timur 4.459	Jawa Timur 11.793	Jawa Timur 7.775	Jawa Timur 8.323
2.	Bangkalan 5.478	Banyuwangi 2.908	Sumenep 7.612	Sumenep 6.558	Bangkalan 5.478
3.	Sumenep 3.927	Sumenep 2.340	Bojonegoro 5.240	Blitar 4.874	Sumenep 3.927
4.	Pamekasan 3.411	Tulungagung 1.655	Sampang 4.743	Pamekasan 4.269	Pamekasan 3.411
5.	Tulungagung 1.897	Lumajang 1.471	Banyuwangi 4.529	Bangkalan 3.759	Tulungagung 1.879

Sumber: *lppk.dwp.or.id*, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 diperoleh data bahwa penyumbang terbesar kegiatan organisasi DWP di Jawa Timur disumbang oleh DWP organisasi perangkat daerah (OPD)/Badan/Dinas setingkat Provinsi Jawa Timur diikuti dari kabupaten kota di pulau Madura dan diikuti kabupaten lainnya seperti tulungagung dan Banyuwangi.

Data mengenai jumlah SKPD yang menyumbangkan pelaporan kegiatan terbanyak didapatkan berdasarkan tabel 1.4 dimana dapat disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyumbangkan kegiatan DWP Provinsi Jawa Timur dengan jumlah yang terbanyak didominasi oleh Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Provinsi, serta pertanian dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Perbedaan peringkat tidak terlalu signifikan berubah di setiap tahunnya dan hanya dicapai oleh SKPD yang sama tetapi berbeda pemeringkatan.

Tabel 1.4 Peringkat SKPD/OPD Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Jumlah E-Reporting Tahun 2017 – 2021

Peringkat	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dispendik 10.516	Dispendik 10.068	Dispendik 9.025	Dispendik 8.589	Dispendik 5.115
2.	Bapenda 5.245	Bapenda 4.809	Pertanian 4.140	Bapeprov 1.542	Bapenda 778
3.	Pertanian 4.601	Pertanian 4.564	Bapenda 4.066	Bapenda 1.331	Bapeprov 742
4.	PU Bina Marga 2.116	Bapeprov 1.972	Bapeprov 1.880	Pertanian 1.196	Pertanian 666
5.	Bapeprov 2.045	PU Bina Marga 1.971	PU Bina Marga 1.802	BPKAD 759	BPKAD 281
6.	BPKAD 1.768	BPKAD 1.647	BPKAD 1.442	PU Bina Marga 652	PU Bina Marga 183

Sumber: *lppk.dwp.or.id*, 2022

Peran perempuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peran domestik memperkuat kapasitas individu dan ketahanan keluarga ASN serta publik melalui ketahanan keluarga umum dan pembangunan nasional. Menindaklanjuti Peraturan Presiden No.59/2017, Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGS), dan Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2018 Program Kerja Dharma Wanita Persatuan diantaranya adalah:

1. Tanpa Kelaparan melalui program malnutrisi dan stunting
2. Kehidupan sehat dan sejahtera melalui gerakan masyarakat hidup sehat sampai pola pengasuhan anak
3. Pendidikan berkualitas melalui pemenuhan wajib belajar, meningkatkan minat baca, dan PAUD

4. Kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang dan sosialisasi tentang KDRT
5. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usaha, pemberdayaan ekonomi produktif dan kreatif serta memasyarakatkan kehidupan berkoperasi
6. *Climate Action* melalui penanaman mangrove
7. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh melalui sosialisasi sapa perempuan anti korupsi (SPAK)
8. Kemitraan untuk mencapai tujuan melalui peningkatan jumlah *Memorandum of Understanding* dengan mitra

Sesuai dengan arahan dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yaitu:

1. Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat seperti kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, hingga persawahan dan tambak.
2. Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita dan anak usia sekolah, penurunan stunting hingga membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.
3. Mendorong Investasi dengan mengundang investasi seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli, dan hambatan investasi lainnya.
4. Reformasi Birokrasi yaitu agar lembaga semakin sederhana, dan semakin simple.
5. Penggunaan APBN yaitu menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agenda RPJMN 2020-2024 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagaimana disebutkan dalam Munas IV tahun 2019 oleh Menpan RB bahwa Dharma Wanita Persatuan adalah Organisasi Wanita terbesar di Indonesia sehingga keberadaan dan keaktifan organisasi Dharma Wanita Persatuan akan sangat membantu untuk mensukseskan pembangunan ekonomi negara dari banyak bidang karena peran perempuan di dalamnya.

Peran Dharma Wanita Persatuan kedepan adalah peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan anggota, berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, masyarakat dan swasta serta berpotensi untuk memajukan dan mengembangkan kualitas hidup perempuan melalui pembangunan berkelanjutan di bidang Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Seorang istri adalah Garwo atau kepanjangan dari Bahasa jawa nya adalah sigarane nyowo maka orang yang paling didengar suami dan menjadi teman berdiskusi adalah istri sehingga kapasitas istri harus ditingkatkan dengan menambah wawasan serta belajar meningkatkan kemampuan.

Wanita sebagai istri maupun ibu sebagai garda terdepan pembangunan sebuah bangsa yang turut andil dalam mencetak generasi berkualitas unggul. Pendirian DWP juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah yang harus memiliki sumber daya manusia berkualitas dan mampu bekerja keras untuk mendorong dan memfasilitasi warga negara agar memiliki kemampuan di segala bidang sehingga mampu berkreasi, berinovasi serta memproduksi.

Organisasi masyarakat ini menaungi para istri aparatur sipil negara yang ada di seluruh Indonesia.

DWP diproyeksikan sebagai organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas suami untuk meningkatkan kinerja. Organisasi ini juga sering melakukan kegiatan sosial dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam Munas IV DWP Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan Dharma Wanita selama ini banyak memiliki peran untuk melaksanakan beragam kegiatan sosial yang tidak hanya ditujukan pada pegawai di lingkungan kerja kereka tetapi juga langsung menyentuh masyarakat, ditangan Dharma Wanita Persatuan citra positif ASN dapat terus ditingkatkan. DWP dapat menjadi penyambung lidah keluhan masyarakat sekaligus sebagai juru bicara informal pemerintah. keluhan tersebut dapat disampaikan kepada para suami masing-masing agar dapat menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan pemerintah.

Keberimbangan pengetahuan istri akan membantu menciptakan aparatur yang berdedikasi dan kreatif dalam mengemban tugas. Cara meningkatkan kualitas SDM DWP adalah dengan berorganisasi yang baik dan memiliki beragam ide serta program Pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu Dharma Wanita Persatuan diharapkan menjadi penggerak dari sisi pemberdayaan wanita untuk turut ikut serta mensukseskan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur terdiri dari seratus satu unsur pelaksana dan terbagi dalam 63 instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota menurut Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebanyak 204.870 anggota.

Berdasarkan tabel 1.5 diperoleh informasi program kerja yang diselenggarakan oleh Organisasi Dharma Wanita Persatuan di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya cenderung mengikuti pada tuntutan jaman serta isu permasalahan terkini. Sebagai contoh kegiatan pada tahun 2020 yang mana tahun awal pandemi banyak

dilakukan kegiatan sosialisasi terutama terkait protokol Kesehatan 3 M dan 5 M serta seminar Kesehatan agar menekan jumlah terpaparnya pasien Covid-19, sedangkan pada 2021 lebih didominasi dengan pemberian bantuan sosial terutama pada anggota dan masyarakat yang terdampak Covid-19 maupun musibah bencana alam di Jawa Timur yang silih berganti yaitu banjir, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi hingga awan panas guguran gunung Semeru yang meluluh lantakkan ribuan rumah penduduk di sekitarnya.

Kegiatan yang menuntut partisipasi anggota organisasi dengan tatap muka seperti pelatihan dan rapat berkurang karena lebih memaksimalkan kegiatan sosial dan melakukan pembatasan kegiatan tatap muka dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Pada Tahun 2021 kegiatan pelatihan dan rapat tidak banyak diselenggarakan dikarenakan jumlah paparan karena virus corona mutasi omicron sangatlah tinggi terutama di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Sehingga berdasarkan keterangan tabel semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan terutama saat pandemi karena terarah pada kepedulian terhadap sesama baik di lingkungan anggota dan masyarakat luas.

Tabel 1.5 Peringkat Program Kerja DWP Berdasarkan Jumlah E-Reporting Tahun 2017 – 2021

Peringkat	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lain lain 4.085	Lain lain 5.860	Rapat 7.886	Sosialisasi 4.880	Bansos 2.831
2.	Sosialisasi 2.660	Rapat 3.420	Sosialisasi 7.447	Rapat 4.485	Sosialisasi 2.752
3.	Iman dan Takwa 1.745	Sosialisasi 3.232	Iman dan Takwa 6.755	Bansos 3.565	Dokumentasi 2.593
4.	Rapat 1.707	Iman dan Takwa 1.960	Dokumentasi 5.324	Olah Raga 3.559	Rapat 2.568

5.	Bansos 1.277	Perayaan 1.701	Olahraga 4.626	Iman dan Takwa 3.459	Pelatihan 2.353
6.	Baksos 1.277	Baksos 1.356	Lain lain 4.622	Pelatihan 3.095	Iman dan Takwa 2.298

Sumber: lppk.dwp.or.id,2022

Rendahnya kualitas hidup perempuan akan berpengaruh pada pembangunan sumber daya manusia karena bangsa Indonesia masih membutuhkan proses pembangunan berkelanjutan. Kualitas hidup anggota dapat diciptakan dengan kreatifitas seorang ibu dalam menunjang ekonomi keluarga, seperti membuka peluang usaha secara mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada suami selaku penanggung jawab ekonomi keluarga, akan tetapi menjadikan suami sebagai mitra untuk mengembangkan dan menguatkan kegiatan usaha atau bisnis istri sebagai pelaku ekonomi keluarga.

Menurut gubernur Sumbar Irwan Prayitno dikutip dari dalam sambutannya tanpa adanya partisipasi dukungan dari organisasi perempuan, pemerintah tidak akan mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, karena organisasi perempuanlah yang berada di lini terdepan dalam mensosialisasikan dan mensinergikan program pemerintah. Seorang ibu mengajarkan mengenai tata nilai dan norma, cinta tanah air dan bangsa serta bangga terhadap bangsanya. Dengan mempertahankan, melestarikan serta menularkan kecintaannya akan budaya bangsa dan adat istiadat kepada anak-anak generasi bangsa serta memberikan contoh bagaimana mencintai bangsa dan menghormati para pahlawannya diharapkan akan terbentuk karakter anak bangsa yang kuat dan cinta tanah air.

Dalam jurnal perempuan dan anak pengertian Pemberdayaan perempuan sendiri pada intinya adalah menanamkan nilai nilai yang bertujuan untuk mengembangkan martabat dan potensi diri dari perempuan secara individual agar mampu menolong mereka sendiri (Sulistyowati, 2016). Konsep pemberdayaan perempuan

menurut kementerian pemberdayaan perempuan menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya memungkinkan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu tindakan dalam upaya meningkatkan status perempuan melalui Pendidikan, peningkatan kesadaran, literasi, serta pemberian pelatihan sehingga wanita memiliki kepercayaan diri dan dapat berperan serta aktif dalam mengambil keputusan dalam permasalahan di masyarakat (Miskiyah et al., 2021)

Secara umum tujuan pemberdayaan perempuan adalah pengembangan dan aktualisasi diri perempuan terhadap potensi dalam dirinya. Pentingnya untuk mewujudkan pemberdayaan pada perempuan melalui organisasi didorong dari besarnya jumlah perempuan dari pada laki laki di Jawa Timur. Tidak dapat dipungkiri besarnya jumlah perempuan yang mendominasi di suatu negara dapat berpotensi menjadi akar permasalahan sosial seperti meningkatnya jumlah kemiskinan, pengangguran, tingginya jumlah pernikahan dini hingga stunting pada balita yang mana kedepan apabila tidak ditangani dengan tepat akan membebani negara.

Dapat dilihat di tabel 1.6 perbandingan jumlah perempuan dan laki laki pada rentang usia yang berbeda. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1.519.215 jumlah perempuan terhadap laki laki dengan jumlah lebih rendah yaitu 1.443.558 di usia produktif 30 – 39 tahun. Begitu pula pada usia diatas 40 tahun dan dibawah 50 tahun jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki laki. Bisa dilihat dari tabel 1.6 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Timur (jiwa), 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20-24	1 525 056	1 496 115	3 021 171
25-29	1 428 018	1 449 905	2 877 923

30-34	1 410 797	1 468 829	2 879 626
35-39	1 443 558	1 519 215	2 962 773
40-44	1 455 102	1 512 419	2 967 521
45-49	1 412 733	1 482 636	2 895 369
50-54	1 280 713	1 366 953	2 647 666
55-59	1 101 766	1 155 344	2 257 110
60-64	866 941	871 967	1 738 908
65+	1 359 263	1 713 262	3 072 525
Jumlah	19 397 878	19 895 094	39 292 972

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2035-2010, BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat secara sekilas bahwa terdapat sebuah peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut serta memberikan kontribusi bagi Indonesia secara umum dan Jawa Timur secara khusus di bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi sehingga diharapkan membentuk tidak hanya kemandirian tapi juga membantu masyarakat di sekitarnya. Perempuan adalah pemberi informasi utama bagi keluarga meskipun bukan merupakan tulang punggung keluarga tapi wajib untuk dapat tetap mandiri secara finansial.

Adanya stigma sejak dahulu perempuan secara tradisional diikat dan dipersatukan norma-norma yang bersifat patriarki dimana laki-laki lebih menonjol sehingga tercipta struktur yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. bahwa menjadi hambatan tersendiri untuk seorang perempuan menjadi bisa lebih maju dan mengaktualisasi dirinya (Farihah,2015).

Pendidikan yang rendah terkadang menghalangi perempuan untuk dapat lebih berani dalam mengaktualisasi diri meski dengan bakat yang dimiliki. Perempuan membutuhkan pendidikan agar minimal dapat mengetahui kesehatan anaknya serta mendampingi anak anaknya dalam menempuh pendidikan. Menurut (Kabeer, 2017) dalam kajiannya “women economic empowerment & inclusive growth” menyatakan Pendidikan bagi perempuan menyediakan kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk perempuan

dimana menyediakan pemberdayaan dalam hal ketenagakerjaan dan parameter sosial lainnya seperti pengurangan jumlah kemiskinan, ketidaksetaraan, ekonomi, perkembangan ekonomi dan lainnya.

Hadirnya sebuah organisasi perempuan tentu diharapkan dapat membantu perempuan untuk dapat lebih pintar dan terarah dengan membekali berbagai ilmu pengetahuan, pelatihan, hingga manajemen dalam sebuah organisasi. Masih adanya anggapan di masyarakat yang membayangi dimana organisasi perempuan hanyalah organisasi yang berisikan anggota perempuan untuk berkumpul dengan kegiatan yang memamerkan gaya hidup berlebihan, karena ada baiknya jika sedang berada pada sebuah organisasi yang membawa nama baik pemerintahan hendaknya lebih memperhatikan tanggung jawab dari pada masalah yang tidak berkaitan dengan kegiatan (Mardianah, 2017). Bergabung dalam organisasi karena faktor keterpaksaan tidak akan baik kedepannya karena sejatinya melalui organisasi perempuan yang sehat justru dapat memperlihatkan bakat dan potensi para perempuan yang dapat membawanya untuk berprestasi, berkreasi melalui ekonomi produktif baik di dalam negeri bahkan hingga luar negeri.

Harapan kedepan organisasi Dharma Wanita Persatuan dapat berjalan lebih professional dengan langkah pengelolaan yang lebih seragam, sistematis dan teratur sehingga program kegiatan yang dijalankan dapat lebih tampak kebermanfaatannya tidak hanya bagi anggota organisasi tapi juga masyarakat sekitar.

Program pemberdayaan perempuan merupakan sebuah upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai pusat perhatian dimana ini berarti kesamaan hak hak ekonomi, tidak diskriminatif pada kaum perempuan. Diperlukan upaya agar perempuan tidak hanya sebagai sebagai posisi penerima namun juga sebagai pelaku perekonomian. Beban hidup seorang perempuan dalam arti istri dan ibu akan jauh lebih berat sepeninggal suami maupun apabila keadaan memaksa menjadikannya orang tua tunggal. Oleh sebab itu diperlukan pemberdayaan agar perempuan dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain terus menerus.

Memberdayakan perempuan di organisasi DWP perlu dirumuskan dengan lebih sistematis dengan program kegiatan yang dapat menekankan pada output peningkatan ketrampilan anggota, kemandirian ekonomi rumah tangga, perluasan wawasan hingga pengetahuan. Organisasi menurut Duha (2018:2) adalah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki sedikit atau semua kesamaan latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Menjadi pengurus sebuah organisasi bukan berarti tanpa kendala, dikarenakan tidak adanya penghargaan pasti berupa insentif sebagai imbalan atas kepengurusan maka membuat para pengurus organisasi menganggapnya sebagai tugas tambahan dan lebih mengutamakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga daripada tanggung jawab menjadi pengurus organisasi (Thalib, 2015) hal ini terkadang membuat sebuah organisasi menjadi kurang profesional dalam manajemennya.

Dalam budaya patriarki, laki-laki tetaplah sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga perempuan yang berkeinginan dan memutuskan untuk berperan di ranah publik harus memiliki persetujuan dari suaminya. Dampak positif yang dirasakan suami apabila istrinya mampu melaksanakan peran ganda adalah dapat membantu kondisi perekonomian keluarga dan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam menyelesaikan rumah tangga dan mengurus anak (Ramadhani, 2016)

Tabel 1.7 dibawah menunjukkan jumlah organisasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2017 dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah organisasi yang terdaftar. Organisasi perempuan hingga Tahun 2017 tercatat ada sebanyak 51 organisasi.

Tabel 1.7 Jumlah Organisasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2015-2017

2015	2016	2017
64	64	64
38	39	40
49	50	51
106	107	107
19	19	19
530	532	534
83	90	93

Sumber: Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa jumlah organisasi wanita semakin meningkat setiap tahunnya tidak kalah dengan organisasi lain. Hal ini menunjukkan bahwa besar keinginan wanita untuk menunjukkan eksistensinya dengan beraktualisasi melalui organisasi yang dianggap tepat serta dapat memfasilitasi guna menyalurkan aspirasi, bakat, dan meningkatkan kemampuan anggotanya. Menurut (Thalib, 2015) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program PKK belum menggambarkan kenyataan sebenarnya bahwa keluarga kaum perempuan telah memperoleh program yang dapat mensejahterakan keluarganya serta belum memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (DP3AKB) dikutip dari laman jabarprov.go.id terdapat sebanyak 80 organisasi perempuan dan anak di Indonesia di antaranya adalah organisasi beranggotakan istri ASN, Polisi hingga Tentara yaitu Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit Kartika candra Kirana dan Jalasenastri.

Juga terdapat organisasi dengan anggota perempuan yang telah purna tugas seperti Dian Kemala, sehingga bisa disimpulkan tidak ada batasan usia bagi anggota organisasi untuk dapat bergabung



KONSEP EKSISTENSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Teori Eksistensi

Eksistensialisme secara etimologi berasal dari kata *eks* yaitu keluar dan *Sistensi* yaitu diturunkan dari kata kerja *sisto* yaitu menempatkan. Eksistensi berasal dari kata *existence* yang berasal dari Bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual. *Existere* sendiri berasal dari kata *ex* yang berarti keluar dan *sistere* yaitu muncul Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan eksistensi sama dengan keberadaan (Pusat Bahasa,2008) dimana eksistensi terkaitdengan keberadaan fisik dan fungsi yang melekat dalam dirinya. Pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi bukanlah objek dari berpikir abstrak atau pengalaman kognitif (akal pikiran) tetapi merupakan eksistensi atau pengalaman langsung yang bersifat pribadi dan dalam batin individu.

Eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri karena eksistensi adalah suatu proses yang dinamis yang mana eksistensi itu sendiri berasal dari *existere* yang artinya keluar

dari, melampaui atau mengatasi jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti melainkan mengalami perkembangan ataupun kemunduran tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi potensinya (Abidin, 2006)

Eksistensi dalam kehidupan sosial manusia yang penting dan terutama adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya dimana eksistensi menganggap keberadaan manusia tidaklah statis tetapi senantiasa menjadi (Dagun, 1997). Manusia sebagai individu selalu bergerak dari sebuah kenyataan karena manusia memiliki kebebasan sehingga gerak perkembangan berdasarkan penilaian manusia itu sendiri. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidupnya karena sebuah konsekuensi apabila kita tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya.

Eksistensi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi, karena melalui eksistensi keberadaan suatu organisasi sosial akan langgeng dan lebih berpotensi berusia panjang serta diakui keberadaannya. Antara organisasi satu dengan organisasi lainnya tentu memiliki eksistensi yang berbeda tergantung bagaimana strategi yang diterapkan guna mempertahankan eksistensinya. Strategi yang banyak diterapkan oleh sebuah organisasi pada masa sekarang adalah pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook, youtube dan melakukan kerjasama dengan instansi maupun organisasi lainnya agar bisa saling belajar, bertukar pengalaman dan mendukung program organisasi.

Beberapa ciri eksistensialisme yaitu adanya motif pokok yaitu cara manusia berada, hanya manusialah yang bereksistensi dan cara khas menunjukkan manusia itu ada serta pusat perhatian ada di manusia. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis karena menciptakan dirinya secara aktif, didalam filsafat eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka yang masih harus dibentuk yang mana filsafat eksistensialisme memberi tekanan pada pengalaman konkret serta pengalaman eksistensialismen (Kierkegaard, 1983)

Eksistensialisme mengisahkan manusia secara menyeluruh menjadi eksistensi manusia itu bukan selesai begitu saja, tetapi harus membuat tindakan untuk diakuinya keberadaan tentang dirinya. Teori eksistensialisme mengutamakan hak kebebasan dari individu seseorang menjadi diri sendiri yang bersifat terbuka terhadap segala kemungkinan yang selalu bersifat baru dalam kehidupan (Satre, 1972).

Satre mengungkapkan bahwa eksistensi lebih dulu ada dibandingkan dengan esensi, dalam arti manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis terlebih dahulu sehingga landasan nilai adalah kebebasan manusia itu sendiri. Kebebasan berarti mampu memilih dan menentukan sikap dari sekian banyak alternatif yang dimungkinkan dengan tanggung jawab.

Cohut (2018) menyampaikan *a social existence theory is one way to understand how individuals conceptualize their existence in a social world, how they learn from others and how they communicate with others* sehingga keberadaan secara sosial akan tampak dalam dunia sosial bila komunikasi dilakukan secara intens. *Social existence theory is one way to understand how individuals conceptualize their existence in a social world, how they learn from others and how they communicate with others* (Devlin, 2021) Keberadaan secara sosial juga penting untuk siapapun dapat bertahan dimana teori berkaitan tentang bagaimana individu mengkonseptualisasikan keberadaannya dalam dunia sosial dan selalu beradaptasi, berkomunikasi, serta belajar dari pihak lain.

Kehadiran media sosial telah menciptakan banyak cara dari organisasi untuk berkembang, serta menyebarkan identitas sebuah organisasi (Devereux, 2017). Eksistensi adalah menjadi atau membuat sesuatu menjadi ada dan tampak sehingga eksistensi tidak kaku ataupun berhenti tetapi mengalami perkembangan ataupun sebaliknya dapat mengalami kemunduran tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki (Malfoy, 2013)

Grant (1988) dalam artikelnya *Women as Manager: What they can offer to Organization* menyatakan bahwa terdapat enam hal yang

harus diperhatikan dalam menunjukkan eksistensi wanita yaitu pertama *communication and cooperation* dimana perempuan lebih cenderung bergantian dalam mengungkapkan pendapat, kedua *Affiliation and Attachment*, ketiga *power* yaitu perempuan cenderung menaikkan kekuatan memberi perhatian dan kasih sayang sedangkan pria dengan tindakan agresif, keempat *Physicality* dimana pendirian bergantung kesempurnaan fisik namun terkadang perempuan cenderung memiliki rasa kurang percaya diri dan rapuh serta mengedepankan emosi.

Eksistensi perempuan menurut Simone de Beauvoir (2003) memiliki empat poin utama terkait fungsi dari perempuan diantaranya adalah: 1. *Women as Others* konsep ini menjelaskan bahwa seorang perempuan akan menukarkan kebebasannya demi sebuah keamanan, 2. *Independent Women* konsep dimana perempuan dalam usaha menunjukkan eksistensinya dapat bekerja di ranah publik dengan seizin suami, 3. *Image Gender* berkaitan dengan peran, atribut, perilaku, sikap, serta sifat yang mana karena salah satu bentuk tugas istri adalah mendukung karir suami, 4. *Institution of Others* adalah konsep dimana istri bertugas untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, dan taat pada perintah suami.

Empat hal tersebut menjadi pertimbangan perempuan untuk melakukan aktivitasnya, dan melakukan aktifitas itupun sudah harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga karena konsep istri dan ibu dapat membatasi aktifitas perempuan bahkan kehilangan kebebasan bahkan berkaitan dengan hidupnya (Fahriyah dan Refti, 2012). Peran istri dan peran ibu dapat membatasi perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi mandiri, perempuan juga harus menunjukkan eksistensinya sebagai seorang manusia sebagai seorang manusia yaitu menunjukkan transendensi untuk menunjukkan kebebasannya (Beauvoir,2003)

Eksistensi dalam sebuah organisasi di era teknologi digital dibutuhkan untuk mendukung seluruh aktifitas organisasi agar dapat berjalan dengan lebih cepat, berhasil baik, efektif serta efisien.

Teknologi harus senantiasa diperbaharui karena penerapan teknologi juga sekaligus sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi, media untuk meningkatkan kualitas informasi dan menganalisa daya saing organisasi.

Penghematan biaya, waktu, produktivitas serta tenaga juga menjadi alasan mengapa teknologi harus diterapkan pada organisasi sehingga dapat berjalan dengan lebih baik dan seragam. Eksistensi organisasi melalui teknologi informasi dapat dikelola dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, tik tok, hingga you tube sehingga keberadaannya akan lebih mudah diakses oleh anggota hingga masyarakat luas.

Pemberdayaan Perempuan

Dengan semakin banyaknya organisasi perempuan yang bertumbuh serta berkembang di masyarakat dan semakin seimbangnyakesetaraan gender memotivasi perempuan untuk dapat membuat dirinya lebih berdaya. Tingginya tingkat pendidikan bagi perempuan di masa kini turut menjadi pendorong kepercayaan diri agar setiap perempuan dapat mandiri, mencari wadah organisasi yang dapat membantu meningkatkan ketrampilan, wawasan, hingga kondisi ekonomi perempuan. Tingkat keaktifan kegiatan dalam berorganisasi menjadi sebuah bukti bahwa perempuan tetap bisa mengaktualisasi dirinya tanpa harus meninggalkan kewajiban utamanya pada keluarga.

Penggunaan kata perempuan di era reformasi, kata dasar dari perempuan adalah Empu yang artinya dipertuan atau dihormati. Perubahan kata wanita menjadi perempuan merupakan simbolisasi perempuan yang awalnya dari objek menjadi subjek. Hal ini menunjukkan penghargaan dan dan kemajuan perspektif dalam menggunakan kata perempuan daripada wanita sesuai kebijakan pemerintah untuk merubah kata menteri urusan peranan wanita menjadi menteri pemberdayaan perempuan (Ahdiah, 2013).

Pemberdayaan perempuan dalam sebuah organisasi dibutuhkan agar sebuah organisasi perempuan dapat bergerak maju serta

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Motor penggerak dari sebuah organisasi tentunya adalah anggota dari organisasi itu sendiri, diperlukan komitmen serta kemauan agar organisasi tetap bergerak mencapai tujuan. Dengan pemberdayaan, perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang dikehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik (Marditama et.al, 2021: 11). Pemberdayaan perempuan penting dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dimana untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai konsep Ilmu Ekonomi Pembangunan, maka diperlukan suatu strategi pembangunan yang tepat. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang paling banyak digunakan dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan karena tanpa perkembangan perempuan maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak akan terjadi.

Kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari *Empowerment* sedangkan kata “memberdayakan” merupakan terjemahan dari *Empower*. Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* kata *Empower* mempunyai dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority* to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta tata dunia di dalam kerangka proses kemanusiaan yang adil dan beradab dimana manusia aktif dalam upaya meningkatkan keberdayaannya (Hasan M, 2018).

Dalam rangka pemberdayaan, upaya yang paling penting adalah meningkatkan pendidikan dan derajat kesehatan serta pembentukan akses pada sumber daya ekonomi dimana pemberdayaan juga melibatkan pengembangan fasilitas mendasar dan infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Pemberdayaan adalah aktivitas yang

diimplementasikan secara berkelanjutan, dinamis, yang secara sinergitas mendorong keterlibatan seluruh potensi yang ada pada komunitas, dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat yang majemuk dengan kesinambungan hak dan kewajiban, saling menghormati tanpa merasa asing di dalam masyarakat.

Pemberdayaan perempuan melalui industri kreatif dapat meningkatkan status sosial, status ekonomi masyarakat, kualitas hidup pribadi, dan melibatkan mereka dalam pembangunan dimana jenjang Pendidikan yang tinggi merupakan instrument yang efektif dalam pemberdayaan perempuan disertai budaya dan kreatifitas (Marditama et.al, 2021) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi kekuasaan, pengalihan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan memberdayakan berarti upaya untuk memberi kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan adalah memanusiakan dalam artian mendorong orang untuk menampilkan hak asasinya. Sedangkan pemberdayaan perempuan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang diberikan kepada perempuan meliputi pelatihan, ketrampilan bahkan pendidikan supaya perempuan mampu mengetahui dan dapat meyalurkan keahlian maupun potensi yang dimilikinya sehingga berkontribusi pada pembangunan di negara Indonesia.

Peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya dapat tercapai melalui pemberdayaan perempuan dimana menurut Priyono (2019:121) Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan sebagai model pembangunan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses kontrol diri, terhadap ideologi dan sumber daya yang akan menentukan kekuatan

dan pelaksanaan melalui kapasitas pengambilan keputusan. Sebagai contoh konsep pemberdayaan yang dikenalkan pada konferensi perempuan internasional di Nairobi, dimana wanita mendapatkan kontrol yang lebih besar atas sumber daya material dan intelektual yang membantu mereka meningkatkan kemandirian dan hak kebebasan. Pemberdayaan sebagai model pembangunan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu (Ashraf dan Ahmad, 2012).

Pada saat model pembangunan berorientasi pada produksi maka bersifat *Top Down* yang mana memiliki ciri-ciri: (1) Sentralisasi, dimana kewenangan pengambilan keputusan dipegang oleh pemerintah pusat ; (2) *Top-Down*, dimana mekanisme perumusan program mengutamakan arus dari atas ke bawah. (3) *Uniformity* dimana pola pelaksanaan pembangunan dengan penyeragaman; (4) Sistem Komando, dimana pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan dengan menunggu komando dari pusat; (5) Ketergantungan, yang terjadi sebagai dampak dari penerapan sistem komando dalam jangka panjang; (6) *Social Exclusion*, dimana pendekatan yang bersifat sentralistis telah memarginalkan masyarakat; dan (7) *Improvement* dimana pada pendekatan *person blame*, identifikasi sumber masalah terletak pada individu sehingga pemecahannya dilakukan melalui level individu, yaitu melalui *Empowerment*.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dari perspektif *People Centered Development* paling banyak sesuai di negara-negara sedang berkembang. Melalui pendekatan ini masyarakat sampai tingkat terbawah diberi kewenangan untuk mengelola pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih memberikan tempat pada aspek manusia dan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan telah menghasilkan perlakuan yang tidak manusiawi atau tidak humanistik.

Pembangunan dengan pendekatan pada rakyat memiliki ciri-ciri: (1) Desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kewenangan



MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL

Perilaku Organisasi

Menurut Kaswan (2019:10) Teori Perilaku Organisasi dideskripsikan bagaimana orang dalam organisasi bertindak secara individual, atau berkelompok, dan bagaimana organisasi berfungsi ditinjau dari struktur, proses, dan budaya. Teori perilaku organisasi mempengaruhi pendekatan MSDM terhadap desain dan pengembangan organisasi serta meningkatkan kapabilitas organisasi sehingga berfungsi secara efektif agar dapat mencapai hasil yang dikehendaki.

Menurut Robbins dan Judge (2015:124) Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menginvestasikan pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektifitas organisasi. Ilmu tersebut mempelajari cara cara orang berlaku di organisasi mencakup multidisiplin ilmu, mengelola keragaman tenaga kerja, menerjemahkan perilaku kedalam tindakan, hingga meningkatkan perilaku etis dalam suatu organisasi.

Di dalam perilaku organisasi adanya komponen sikap dan perilaku. Sikap dinyatakan sebagai refleksi perasaan terhadap suatu hal, dan menunjukkan nilai-nilai diri sehingga sikap akan menjadi penentu seseorang dalam berperilaku. Sikap kerja utama tercermin dalam perasaan positif terhadap pekerjaannya, serta kepuasan kerja, dan komitmen organisasi dimana kepribadian dan nilai-nilai individu ditempat kerja juga menjadi bahasan dalam perilaku organisasi karena berkaitan dengan kecocokan interaksi di organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik individual, kelompok, maupun organisasi (Wijaya, 2017).

Organisasi merupakan kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, dapat dicapai secara bersama-sama, dimana dalam melaksanakan tindakan tersebut terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi masing-masing personal yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi (Subkhi dan Jauhar dalam Ambarwati, 2018: 53)

Menurut Robbins dan Judge (2015: 5-6) bahwa perilaku organisasi merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasikan pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Oleh karena perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus pada situasi terkait pekerjaan, maka ia menekankan perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktifitas, kinerja manusia, dan manajemen.

Dalam perilaku organisasi mempelajari determinan perilaku dalam organisasi yaitu: individu, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi itu cenderung menekankan produktivitas, kemungkinan, tingkat keluarnya karyawan, dan kepuasan kerja. Keempat ini sebagai determinan kritis dari keefektifan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Bahwa organisasi itu produktif, jika organisasi

itu mencapai tujuan-tujuannya, dan mencapainya dengan cara mengubah masukan menjadi keluaran dengan biaya paling rendah. Perilaku organisasi mencakup motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, dan rancangan kerja.

Perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan dan lakukan di dalam dan di sekitar organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi tentang perilaku manusia dalam pengaturan organisasi, hubungan antara individu dengan organisasi, dan organisasi itu sendiri. Namun Perilaku merupakan sebuah fungsi dari variabel-variabel individual, variabel keorganisasian, dan variabel psikologikal (Wijaya, 2017:2).

Perilaku organisasi nantinya akan membentuk tradisi yang membentuk budaya. Budaya mampu menjadi pembeda dalam pengambilan keputusan sekaligus menjadi kekuatan yang mampu memberikan kestabilan pada suatu organisasi.

Budaya organisasi sendiri mengacu pada suatu sistem yang menjadi *sharing knowledge* dan menjadi batasan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya (Robbins dan Judge, 2019:355). Dengan kata lain budaya organisasi bukan tentang suka tidaknya sumber daya manusia di dalam organisasi melainkan memberi pemahaman tentang bagaimana sumber daya manusia dalam memandang organisasinya (Robbins dan Judge, 2019:356).

Menurut McShane dan Von Glinow yang dikutip Wijaya (2017:11) merumuskan perilaku individu sebagai model MARS yang terdiri dari:

1. *Motivation* mencerminkan kekuatan dalam diri orang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan kekuatan orang tersebut dalam perilaku sukarela.

2. *Ability* atau kemampuan merupakan natural aptitude, kecerdasan alamiah dan *learned capabilities*, kapabilitas yang dipelajari dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas
3. *Role perception* adalah persepsi terhadap peran diperlukan untuk mewujudkan pekerjaan dengan baik.

Kajian efektivitas organisasi haruslah di mulai dari yang paling mendasar menurut Robbins dalam Ambarwatie (2018:55) pada empat pendekatan dalam mempelajari efektivitas individu:

1. Pendekatan pencapaian tujuan yang menunjukkan bahwa suatu efektifitas organisasi dinilai lebih pada kaitannya dengan tujuan akhir daripada prosesnya. Dengan demikian asumsi yang dipakai harus dapat terukur seperti laba.
2. Pendekatan sistem dimana tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam satu elemen dan masing-masing akan saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan kelangsungan hidup organisasi dalam jangka waktu lama.
3. Pendekatan konstituen strategis dimana menunjukkan organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat memuaskan keinginan para konstituen dalam lingkungannya. Dimana masing-masing konstituen memiliki keinginan yang berbeda-beda.
4. Pendekatan nilai-nilai persaingan dimana pendekatan ini menawarkan suatu kerangka penawaran yang lebih integratif dan lebih variatif karena kriteria yang dipilih bergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam organisasi.

Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil pada kerja individu organisasi. Efektivitas kelompok tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok anggota organisasi. Efektivitas organisasi adalah merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok atau tim yang saling sinergis. Moore menjelaskan tentang Teori Efektivitas Organisasi

(Moore dalam Sutarto, 1995: 45) bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi antara lain:

1. Departementasi, suatu organisasi yang besar mempunyai tugas-tugas pekerjaan yang sangat variasi atau kompleks, oleh karena itu agar dalam melakukan kontrol lebih mudah dilakukan pengelompokan tugas yang sejenis atau serumpun. Pengelompokan tugas inilah yang disebut departementasi.
2. Rintangan Kontrol, yaitu jumlah tingkatan dalam hirarki otoritas, dari mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat puncak.
3. Kontrol atau pengawasan dalam sebuah organisasi sangat penting, hal ini dimaksudkan agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Kepemimpinan yaitu proses memerintah dan mempengaruhi agar kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait itu dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Pendelegasian wewenang, yaitu rasio jumlah keputusan-keputusan manajemen khusus, yang telah didelegasikan oleh eksekutif puncak, dibandingkan dengan jumlah keputusan yang harus dibuatnya berdasarkan otoritas yang dimiliki.
6. Ide-ide bawahan, bahwa suatu penghargaan apabila pemimpin mengakomodasi ide-ide bawahan, hal ini dikarenakan setiap gagasan bawahan apabila mendapatkan perhatian oleh pimpinan akan dapat meningkatkan kreativitas pegawai dan sebaliknya.
7. Motivasi, adalah kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan, dan ini lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
8. Spesifikasi, yaitu jumlah spesialisasi okupasional, dan jangka waktu pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing pihak atau tingkat dimana syarat-syarat yang sangat terspesialisasi

dirumuskan dalam deskripsi pekerjaan formal untuk melaksanakan bermacam fungsi.

Keefektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efektifitas organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan (Ambarwati, 2018: 51) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi berdasarkan fungsi-fungsi yang terkait dalam aspek manajemen dalam suatu organisasi modern yaitu antara lain:

1. Perencanaan (*Planning*), yaitu proses menetapkan tujuan, cara pelaksanaan atau strategi serta koordinasi kegiatan untuk memperbaharui rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu proses pengaturan dan alokasi pekerjaan, kewenangan dan sumber daya yang ada kepada anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Ditentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan (*tasks are to be done*), siapa melapor kepada siapa dan dimana keputusan itu di buat.
3. Kepemimpinan (*leadership*) yaitu proses memerintah dan mempengaruhi agar kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait itu dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Antara lain yang akan dilakukan adalah memotivasi bawahan, memerintah mereka, menyeleksi saluran komunikasi yang efektif dan memecahkan konflik atau masalah yang timbul. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi adalah suatu sistem yang saling pengaruh mempengaruhi serta memperoleh dukungan dari efektivitas individu/ perorangan yang bekerjasama dalam keefektifitasan kelompok, yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, namun di lain pihak,

organisasi publik secara umum juga memiliki suatu kelemahan atau kurang-efektifan oleh karena fungsi-fungsi yang melekat yakni: perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan.

Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis

Menurut Peter drucker dalam Kaswan (2019:70) “Mengelola sumber daya manusia organisasi akan menjadi lebih penting secara signifikan mengingat sumber daya ini segera menjadi asset yang paling penting dan merupakan sarana untuk mendapatkan keunggulan bersaing”. Dimana agar mencapai efektivitas yang maksimal, fungsi MSDM harus secara terpadu dilibatkan dalam proses manajemen strategis organisasi. Pengertian MSDM strategis oleh Rogers (2012:403) sebagai “*the process of developing, implementing, and evaluating HR strategies intended to support business strategies*”.

Dalam pengertian ini merupakan merupakan proses mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi strategi SDM yang dimaksudkan untuk mendukung strategi bisnis. Sehingga dalam MSDM strategis, strategi SDM tidak hanya harus selaras, tetapi juga harus mendukung strategi bisnis/organisasi. Dalam *resorce based model* didasarkan pada pandangan bahwa manusia hanya salah satu sumber daya yang tersedia bagi organisasi yang perlu dimanfaatkan menjadi kesatuan yang padu dalam menyampaikan strategi yang dikehendaki. Pandangan ini menekankan pencapaian keunggulan bersaing melalui pengembangan modal manusia, bukan hanya keselarasan SDM dengan strategi.

Terdapat empat keterpaduan antara fungsi MSDM dengan fungsi manajemen strategis yaitu:

1. Keterkaitan administratif
Perhatian fungsi MSDM terfokus pada aktivitas sehari-hari, dimana eksekutif MSDM tidak mempunyai waktu atau kesempatan melakukan tinjauan strategis atas isu isu SDM.

Departemen hanya terlibat dalam pekerjaan administrative tanpa terkait kebutuhan inti bisnis perusahaan

2. Keterkaitan satu arah, fungsi perencanaan strategis mengembangkan rencana strategis dan menginformasikan rencana kepada departemen MSDM. Dimana peranan fungsi MSDM adalah mendesain sistem atau program yang mengimplementasikan rencana strategis
3. Keterkaitan dua arah
Mempertimbangkan isu-isu SDM selama proses formulasi strategi. Eksekutif SDM menganalisis implikasi MSDM mengenai strategi strategi itu dan mempresentasikan hasil analisis kepada tim perencana strategis.
4. Keterkaitan terpadu
Keterkaitan terpadu bersifat dinamis, mempunyai aneka fase, dan didasarkan pada interaksi terus menerus bukan berurutan. MSDM eksekutif merupakan anggota terpadu tim manajemen senior. Organisasi yang memiliki keterkaitan terpadu memiliki fungsi MSDM yang terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi strategis. Dengan demikian dalam manajemen strategis fungsi MSDM dilibatkan dalam formulasi dan implementasi strategis. Informasi kapabilitas membantu top manager memilih strategi terbaik karena mereka dapat mempertimbangkan seberapa baik rencana itu diimplementasikan.

Kompetensi MSDM Unggul

Manajer umum maupun professional MSDM harus memiliki seperangkat kompetensi yang membangun keunggulan bersaing agar praktik MSDM yang digunakan bisa mencapai keunggulan kompetitif. Kompetensi itu antara lain individu-individu itu harus mengetahui bisnis, mengikuti perkembangan SDM terbaru, mengelola proses perubahan, dan mengintegrasikan semua peran itu dalam konteks misi organisasi. Manajer umum perlu mengembangkan setidaknya

empat kompetensi besar: menciptakan kebutuhan untuk perubahan MSDM, menciptakan visi akan pentingnya praktik MSDM, memberikan dukungan untuk aktivitas MSDM, dan menjadi capak dalam menjalankan praktik MSDM.

Pepatah “Sendirian, sedikit sekali yang mampu kita kerjakan;bersama-sama begitu banyak yang mampu kita hasilkan” oleh Helen Keller (Kaswan, 2019: 225). Keterlibatan kerja atau *job involvement* (keterlibatan pegawai), *participation* (partisipasi), *participative management* (manajemen partisipatif), *employee voice*, atau *participative decision making* (pembuatan keputusan partisipatif) mendorong keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di semua level organisasi dalam menganalisis masalah, pengembangan strategi dan implementasi solusi. Newstrom (2011:197) menjelaskan “*participation is the mental and emotional involvement of people in group situations that encourages them to contribute to group goals and share responsibility for them*”. Partisipasi merupakan keterlibatan orang secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorong mereka berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab terhadap kelompok itu. Terdapat tiga gagasan penting yaitu Keterlibatan, Kontribusi, dan Tanggung Jawab.

Era Digital

Era teknologi digital yang berkembang begitu pesat saat ini telah membangun manusia mempermudah melakukan beragam aktifitas tanpa adanya batasan ruang dan waktu. *The Digital era is characterized by technology which increases the speed and breadth of knowledge turnover within the economy and society. The heart of digital era is information and communication technology which is globally marked by industry 4.0* (Sheperd and Fraser, 2004). Era digital dimulai dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang dimulai pada era industri 4.0. Era digital dapat dilihat sebagai perkembangan sistem evolusioner dimana pergantian pengetahuan tidak hanya sangat

tinggi namun juga semakin membuat manusia menjadi bergantung dengan teknologi yang tersedia.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk mengiklankan suatu barang dan jasa serta memberikan informasi melalui seperti kegiatan sosial organisasi di media sosial. Kehadiran media sosial telah menciptakan banyak cara dari organisasi untuk berkembang, serta menyebarkan identitas sebuah organisasi (Devereux, 2017).

Terdapat kompetensi baru yang dibutuhkan dalam menghadapi era digital seperti literasi teknologi, literasi data dan manusia karena terdapat perubahan di era revolusi industri 4.0 seperti *knowledge at your fingertips* yang berarti seluruh informasi dapat diakses melalui jari di dunia maya, *rapid development of knowledge* dimana pengetahuan bertambah dengan begitu cepatnya bahkan disaat kita mengakses detik ini pada saat yang sama informasi baru sedang masuk, *dynamic workforce and skill stability hingga volatile uncertain complex and ambiguous (VUCA) world* dengan pengetahuan hampir semua informasi terdigitalkan sehingga karakteristik informasi terkadang bisa menjadi ambigu, tidak jelas dan kompleks namun menciptakan lapangan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Menurut Anderson (2017) Inovasi digital saat ini yang semakin canggih memberikan tuntutan pada organisasi untuk mengadopsi perubahan dan meningkatkan sistem digitalisasi. Sumber daya manusia dirubah menjadi sistem yang terdiversifikasi dan berorientasi pada manusia dengan tugas tugas yang ditransformasikan ke digital. Perlu adanya perubahan di semua tingkatan sebuah organisasi yang modern serta memiliki potensi untuk terus beradaptasi, tidak hanya sistem yang memudahkan namun kecerdasan buatan kedepannya akan menggantikan semua semua program intelektual dengan beragam fungsi (Makriddakis,2017). Peningkatan ketertelusuran digitalisasi membawa revolusi dalam cara organisasi kinerjanya yang juga berarti perubahan besar bagi manajemen sumber daya manusia (Larkin,2017).

Seperti disampaikan Alwy (2022) sumber daya manusia organisasi perlu dibekali untuk bekerja di era digital dan harus memiliki kompetensi dalam analisis data dan literasi teknologi. Implikasi bagi organisasi adalah memanfaatkan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien, produktif, efektif, dan gesit serta memberikan peran yang lebih strategis dalam organisasi. Otomatisasi membebaskan waktu bagi orang-orang bekerja di organisasi untuk lebih memiliki lebih banyak waktu mengambil keputusan bisnis strategis. Berinvestasi melalui sistem informasi manajemen, sosial media, teknologi seluler dan cloud membawa keuntungan pengembalian bagi organisasi.

Digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia adalah penggunaan teknologi informasi pada penerapan manajemen informasi dan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan atau organisasi. Data serta dokumen organisasi yang awalnya disimpan dalam bentuk manual diubah menjadi bentuk digital dan disimpan ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi. Dengan digitalisasi manajemen organisasi maka perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja karyawan. Digitalisasi pada organisasi juga memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memantau kinerja karyawan dengan lebih akurat dan memberikan umpan balik balasan dengan lebih cepat.

Kata Millennial berasal dari Bahasa Inggris, *Millenium* yang berarti masa seribu tahun (Echols dan Shadily, 1980:380), era millennial juga terkait dengan mereka yang hidup antara tahun 1980-2019 atau mereka yang pada rentang usia tertinggi 40 tahun dimana selanjutnya disebut dengan generasi Y. Era digital ditandai akan memiliki visi yang jauh kedepan dalam rangkaian hubungan internasional, semakin modern dengan iklim elektronik yang meluas, suasana serba dalam jaringan media sosial yang dunia yang tidak terbatas, era digital juga ditandai dengan adanya teknologi kecerdasan buatan yang menghasilkan generasi pemimpin dan karyawan yang cenderung individual juga

kritis dan tidak takut berdebat karena kemudahan komunikasi dan pengetahuan (Nata, 2020: 25). Generasi millennial menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan tegas dibandingkan dengan generasi sebelumnya di usia yang sama (Deal et al, 2010).

Sebagian besar literatur yang menulis tentang Millenia juga merasa pentingnya untuk memahami perbedaan generasi, tentang pandangan setiap generasi pada yang diharapkan pada organisasi (Nichols, 2015). Generasi millennial seringkali dikeluhkan oleh generasi *baby boomers* sulit untuk diajak interaksi, terlalu fokus pada satu hal tertentu serta suka menonjolkan diri dan mempertahankan pendapatnya. Generasi Millennial juga memiliki nilai negative seperti kurang sabar, kurang beretika, serta kurang setia dalam pekerjaan (Myers dan Sadaghani, 2010). Dalam kajian ini mengambil fokus pada Era digital adalah dengan maksud sebuah organisasi harus mau dan maju dalam pengembangan sesuai dengan dunia modern dengan anggota yang juga mayoritas di generasi millennial serta adanya bonus demografi dengan masyarakat jumlah terbanyak di generasi millennial (tabel 1.1), hal ini perlu dilakukan agar organisasi mengikuti perkembangan jaman dengan regenerasi yang tepat dan nuansa organisasi yang jauh lebih segar dan tidak monoton.

Berdasar data perserikatan bangsa-bangsa bahwa pada Desember 2018 telah tercatat terdapat 3,9 miliar orang atau setengah lebih populasi dunia telah menggunakan internet. Tidak sedikit pegiat media sosial memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan eksistensi individu maupun organisasi karena dalam konteks organisasi maupun bisnis eksistensi mencerminkan bagaimana perusahaan hadir dan diakui oleh masyarakat sebuah organisasi yang memiliki eksistensi yang kuat akan lebih dikenal, dihargai, dan dipercayai oleh audiensnya (Valiant, 2020).

Teknologi semakin menjadi hal yang utama di era revolusi 4.0 dan society 5.0 dimana penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan dan efektif pada daya saing dan keberadaan sebuah organisasi. Teknologi memiliki fungsi



IV

MENGENAL ORGANISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

Gambaran Organisasi Dharma Wanita Persatuan

Organisasi Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia dan sebagai organisasi istri aparatur sipil negara yang sudah selayaknya mempunyai *standing position* untuk mengambil peran strategis dalam konstalasi pembangunan nasional yang dijamin oleh undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Dharma Wanita Persatuan tentunya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan strategisnya untuk menyesuaikan program DWP dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Dharma Wanita Persatuan terdiri dari istilah Dharma yaitu berbudi pekerti luhur dan wanita adalah perempuan maka Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai

Negeri Sipil atau sekarang lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dharma Wanita Persatuan menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada Munas Luar biasa tanggal 7 Desember 1999 adalah organisasi kemasyarakatan non partisipan bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun yang menghimpun dan membina istri pegawai ASN dengan kegiatan Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Dilatarbelakangi dari premis bahwa di balik pria sukses, terdapat wanita hebat di belakangnya yang senantiasa memberikan dukungan, maka organisasi ini dibentuk juga dengan harapan terdapat wanita hebat yang berwawasan luas dan dapat mendukung kinerja suami. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima informasi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan kurang, informasi yang diterima dengan baik oleh ibu menjadi bekal dalam pola asuh anak-anaknya (Lailatul & Ni'mah., 2015).

Tujuan DWP adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota, untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tugas pokok Dharma Wanita Persatuan adalah melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pekerti luhur. Membina anggota dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian sosial.

Sejarah Dharma Wanita Persatuan

Dharma Wanita Persatuan awal mulanya terbentuk pada 5 Agustus 1974 didirikan atas prakarsa ibu Tien Soeharto serta pendiri ibu Amir Machmud selaku Ketua Dewan Pembina Korpri dan hanya beranggotakan istri Pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI dan

pegawai BUMN. Pada era Reformasi 1998 melalui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 7 Desember 1999 berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan yaitu sebagai organisasi beranggotakan istri aparatur sipil negara yang netral dari politik dan independen. Asas Dharma Wanita Persatuan adalah Pancasila. Dharma Wanita eksis selama 32 tahun orde baru berkuasa di Indonesia. Saat orde baru tumbang karena gerakan reformasi di tahun 1998, Dharma Wanita sadar bahwa perlu ada perubahan untuk bisa menyelaraskan diri dengan zaman sehingga pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Dharma Wanita yang diselenggarakan 6-7 Desember 1999, muncul keputusan untuk mengganti nama menjadi Dharma Wanita Persatuan (DWP). Seluruh rancangan anggaran dasar disahkan dan menetapkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan terpilih, Ny. Dr. Nila F Moeloek. Tidak hanya itu spektrum pergerakan organisasinya juga ingin lebih dimantapkan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.



Gambar 4.1 Organisasi Perempuan Jaman Orde Lama

Sumber: historia.id

Sebagai salah satu organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia, sudah selayaknya DWP memiliki *standing position* dan mengambil peran strategis dalam konstalasi pembangunan

nasional. Pada pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan bahwa ormas berkewajiban untuk: a) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, c) memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat, d) menjaga ketertiban umum dan tercapainya kedamaian dalam masyarakat, e) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, f) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Melalui visi menjadi organisasi istri pegawai aparatur sipil negara yang professional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa. Misi mengembangkan SDM DWP yang berkualitas dan berwawasan global, menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui bidang Pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial budaya secara demokratis, meningkatkan kerjasama multipihak dalam pelaksanaan program kerja DWP serta mengembangkan sistem informasi manajemen DWP secara terintergrasi dan berbasis data.

Berikut informasi mengenai Dharma Wanita Persatuan dikutip dari Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Tahun 2016:

Keanggotaan DWP

Anggota Dharma Wanita Persatuan adalah:

1. Istri Pegawai ASN,
2. Istri Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Istri Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di lingkungan instansi sipil;
3. Istri pensiunan dan janda ASN;
4. Pegawai ASN perempuan dan pensiunan pegawai ASN yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota;
5. Istri Kepala perwakilan RI diluar negeri;
6. Istri staf ahli di kementerian;

7. Istri pejabat negara dibidang pemerintahan; dan
8. Istri pegawai dan istri pensiunan serta janda Pegawai Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum (PTNBH)

Keanggotaan DWP terdiri dari: a. anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

Susunan Organisasi DWP terdiri dari: a. DWP Pusat; b. DWP Instansi; c. Pemerintah Pusat; d. DWP Provinsi; e. DWP Kabupaten atau DWP Kota; f. DWP Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; dan g. DWP Kelurahan

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pekerti luhur,
2. Membina anggota dalam kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan Kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial. DWP berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi DWP menjadi Organisasi istri aparatur sipil negara (ASN) yang professional untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional.

Misi DWP adalah: 1. Mewujudkan sumber daya manusia DWP yang kompeten dan berdaya saing global; 2. Mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya ; 3. Menetapkan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan program kerja DWP ; 4. Mengembangkan sistem informasi manajemen DWP. Penjelasan dari misi pertama adalah perwujudan dari nilai profesionalitas dalam visi DWP, misi ini

menggambarkan peran sumber daya manusia DWP sebagai modal utama bagi DWP untuk menjalankan tugas fungsi dan perannya selaku bagian integral dari pembangunan nasional. Misi kedua adalah wujud dari upaya DWP berperan serta dalam pembangunan nasional khususnya dalam upaya menyejahterakan anggota, keluarga serta masyarakat melalui program kerja Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya secara demokratis. Misi ketiga merupakan wujud dari nilai profesionalitas dalam visi DWP khususnya dalam rangka mencapai hasil yang optimal melalui kolaborasi dengan mitra kerja yang memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing. Misi keempat merupakan wujud dari nilai profesionalitas dalam visi DWP khususnya dalam rangka membangun kaidah proses yang akuntabel dan berkualitas. Tujuan Dharma Wanita Persatuan adalah terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota, untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendanaan dan Masa Berakhirnya Keanggotaan Organisasi

Keuangan organisasi Dharma Wanita Persatuan diperoleh dari: a) Iuran anggota; b) Bantuan Pemerintah; c) Sumbangan lain yang tidak mengikat; d) Usaha lain yang sah. Keuangan organisasi DWP diverifikasi setiap tahun.

Keanggotaan DWP berakhir apabila: a) meninggal dunia; b) Tidak memenuhi ketentuan keanggotaan ; melanggar ketentuan pasal 43 dan atau pasal 5 ayat 1 anggota biasa dan melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan DWP.

Prinsip Penyusunan Rencana Kerja

Menurut petunjuk pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan tahun (Manggabarani et. al, 2016) Penyusunan rencana kerja Dharma Wanita Persatuan pada masing-masing tingkat kepengurusan disusun berdasarkan rencana strategi (Renstra) DWP hasil Munas tahun 2019, didasarkan atas kebutuhan nyata sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan. Penyusunan rencana kerja untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan rencana pembelanjaan jangka menengah daerah masing-masing secara musyawarah dan melibatkan peran serta anggota.

Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia berdampak pada hampir seluruh sendi kehidupan, tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial budaya, penurunan kualitas kesehatan, namun juga menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dan berpotensi menurunnya kualitas Pendidikan. Untuk itu, sebagai mitra pemerintah, DWP terus melakukan Langkah nyata sebagai bagian upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga baik meliputi peningkatan ekonomi, Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya agar penurunan kualitas dan ketahanan keluarga dapat diminimalisir.

Di era digital ini masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi apapun dari seluruh dunia dengan hitungan detik. Hal ini membawa dampak positif dan negative yang mana dampak positif era digital antara lain mudahnya mendapat pengetahuan dan ketrampilan di berbagai bidang kehidupan, membuka ruang yang sangat luas untuk mengembangkan usaha, serta berkomunikasi dimanapun kita berada, proses pembelajaran, pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien tanpa bertatap muka, akses untuk berkarya lebih luas, mengenal banyak budaya dan banyak hiburan yang tersedia

dan lainnya. Dampak negatifnya antara lain ikatan emosional antar anggota keluarga dan masyarakat dapat memudar karena interaksi sering dilakukan dengan media digital, tidak peka terhadap keadaan sekitar, menumbuhkan sikap individualisme, konsumerisme, anti sosial, meningkatnya potensi kekerasan fisik non fisik, tindak kejahatan, plagiasi, banyak beredar berita hoax/fitnah, pornografi, paham radikalisme dan terorisme, kecanduan internet dalam berbagai bentuk berdampak pada masalah kesehatan, membahayakan data pribadi serta berbagai dampak negatif lainnya.

Untuk menghadapi keadaan ini perempuan merupakan sosok sentral dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan keluarga karena karena perempuan adalah seorang ibu yang mengandung dan melahirkan generasi muda selanjutnya, mengasuh dan mendidik anak mulai dalam kandungan sampai dewasa sedangkan sebagai istri yang merupakan pendamping suami dan mendukung tugas-tugas suami suami.

Sebagai warga masyarakat dan warga negara, perempuan juga yang diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Terlebih bagi seorang perempuan yang bekerja, berkarier atau menjadi pemimpin suatu Lembaga tentunya tugas dan tanggung jawabnya akan menjadi lebih besar lagi. Bahkan saat ini banyak perempuan yang berperan membantu menopang kehidupan ekonomi keluarga sehingga tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa di tangan perempuanlah wajah generasi penerus bangsa terbentuk dan kondisi ketahanan keluarga terwujud. Maka perempuan harus cerdas menyikapi perkembangan di era digital dan memanfaatkannya untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui bidang-bidang dalam organisasi. Dharma Wanita Persatuan sendiri adalah organisasi kemsyarakatan beranggotakan perempuan yang terdiri dari tiga bidang kegiatan utama yaitu bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Bidang Pendidikan Organisasi

Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti TK, SD, SMP, MTS, SMA sampai Diploma dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pendidikan tinggi dapat berbentuk universitas atau akademik. Pendidikan nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berbentuk Lembaga kursus atau pelatihan serta jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dan hasil Pendidikan diakui sama dengan Pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan. Bentuk kegiatan bidang Pendidikan juga dapat berupa perpustakaan, taman bacaan, dan sudut baca dalam upaya mewujudkan budaya gemar membaca sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan para anggota DWP dan keluarganya.

Tujuan program kerja bidang Pendidikan adalah terwujudnya peningkatan Pendidikan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap mental anggota DWP dan keluarganya serta masyarakat dalam segala segi kehidupan.

DWP di Jawa Timur juga memiliki sekolah di berbagai jenjang yang masing masing sekolah tersebut dikelola oleh DWP di instansi wilayah sekolah tersebut. Berikut adalah tabel sekolah Dharma Wanita Persatuan di wilayah Jawa Timur beserta organisasi yang mengelolanya.

Tabel 4.1 Pendidikan Sekolah Formal/Nonformal yang dikelola dan dibina DWP di Provinsi Jawa Timur

No	TK/Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Pengelola	
1.	TK Pertiwi Teladan Surabaya				DWP Setda Jawa Timur	
2.	TK Kartini Surabaya					
3.	TK Tunas Pertiwi Surabaya					
4.	TK Citra Tunas Bangsa Sidoarjo					
5.	TK Pertiwi Sampang TK					
6.	Pembangunan, Sampang					
7.	TK Polagan, Sampang					
8.	TK Delima, Sampang TK					
9.	Perjuangan, Sampang					DWP Kabupaten Sampang
10.	TK DWP I, Camplong					
11.	TK DWP II, Sampang					
12.	TK DWP I, Tanjung					
13.	TK DWP II, Tambaan					
14.	TK DWP I, Omben					
15.	TK DWP II, Omben					

No	TK/Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Pengelola
16.	TK DWP Moktesereh, Sampang				DWP Kabupaten Sampang
17.	TK Bhakti Nusa, Sampang				
18.	TK DWP Sreseh, Sampang				DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jatim
19.	TK Liya 3, Surabaya				
20.	TK PAUD Liya, Surabaya				
21.	TK Pertiwi, Blitar				
22.	TK Tanjungsari, Blitar				Kabupaten Blitar
23.	TK Idhata, Blitar				
24.	TK Tanggung, Blitar				
25.	42 TK di Kabupaten Bangkalan				
26.	5 TK DWP di Kota Surabaya	SD Surya Hummanity School	SMP Dharma Wanita Surabaya	SMA Dharma Wanita Surabaya	DWP Kota Surabaya
27.	351 TK di Sidoarjo		8 sekolah SMP di kota Sidoarjo	5 sekolah SMA di Sidoarjo	DWP Kab Sidoarjo
28.	12 TK di kota Madiun				
29.	20 TK di Kab Sampang				

No	TK/Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Pengelola
30.	320 TK di Kab Ngawi				DWP Kab Ngawi
31.	249 TK di Kab Malang				DWP Kab Malang
32.	18 TK yang dikelola DWP Kab Tulungagung				DWP Kab Tulungagung
33.	127 TK di Kab Pasuruan				DWP Kab Pasuruan
34.	185 TK di Kab Lumajang				DWP Kab Lumajang
35.	233 TK di Kab Ponorogo	SD LB DWP Kabupaten Ponorogo			DWP Kab Ponorogo
36.	191 TK di Banyuwangi				DWP Kab Banyuwangi
37.	63 TK di Kab Jember				DWP Kab Jember
38.	40 TK di kota Kediri				DWP Kota Kediri
39.	414 TK di Kab Kediri				DWP Kab Kediri
40.	49 TK di Kab Pacitan				DWP Kab Pacitan
41.	TK DWP Tunas Muda, Ngawi				DWP Kab Ngawi
42.	270 TK di Kab Mojokerto				DWP Kab Mojokerto
43.	312 TK di Kab Magetan				DWP Kab Magetan
44.	41 TK di Kab Bangkalan				DWP kab Bangkalan

No	TK/Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Pengelola
45.	191 TK di Kab Lumajang				DWP Kab Lumajang
46.	107 TK di Kab Jombang	4 SD LB di Kab Jombang	4 SMP LB di Kab Jombang	4 SMA LB di Kab Jombang	DWP Kab Jombang
47.	36 TK di Kab Pamekasan				DWP Kab Pamekasan
48.	15 TK di Sumenep	SD LB di Kab Sumenep			DWP Kab Sumenep
49.	9 TK di Madiun	SD LB Jiwan dan SD LB Kebonsari	SMP LB Jiwan, Madiun	SMA LB Jiwan, Madiun	DWP Kab Madiun
50.	TK Pertiwi, Nganjuk				DWP Kab Nganjuk
51.	127 TK di Kab Pasuruan				DWP Kab Pasuruan
52.	350 TK di Sidoarjo				DWP Kab Sidoarjo
53.	TK Idhata, Tulungagung				DWP Kab Tulungagung
54.	406 TK di Kediri				DWP Kab Kediri
55.	9 TK di Blitar				DWP Kab Blitar
56.	15 TK di Kab Bondowoso				DWP Kab Bondowoso
57.	40 TK di Kediri				DWP Kab Kediri
58.	183 TK DWP di Banyuwangi				DWP Kab Banyuwangi

Sumber: dwp provinsi Jatim, 2022

Program kerja bidang Pendidikan adalah a) meningkatkan Pendidikan bagi anggota dan keluarganya melalui bantuan Pendidikan secara berkesinambungan; b) Membina secara baik dan tepat lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang dibina oleh Dharma Wanita Persatuan; c) Menyelenggarakan Pendidikan non formal dan informal agar dapat secara nyata meningkatkan kemauan, keterampilan, serta memperluas wawasan para anggota DWP dan keluarganya serta masyarakat sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mampu meningkatkan kesejahteraannya; c) Meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan, taman bacaan, dan sudut baca sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi bagi anggota DWP dan keluarganya.

Kegiatan yang dilakukan melalui Pendidikan formal adalah: 1) menyalurkan bantuan yang tidak mengikat sesuai dengan data Pendidikan bagi putra-putri pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan I, II, III, dan honorer, 2) Memonitor dan mengevaluasi bantuan Pendidikan; 3) Mendata penyelenggaraan Pendidikan sekolah yang dibina oleh Dharma Wanita Persatuan antara lain status sekolah, status guru, jumlah murid, status kepemilikan tanah, serta status pengelola; 4) Hasil pendataan dilaporkan kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan satu tingkat di atasnya untuk dijadikan dasar merumuskan kebijakan lebih lanjut.

Kegiatan yang dilakukan melalui Pendidikan nonformal dan informal adalah: 1) Menentukan jenis Pendidikan nonformal dan informal berdasarkan kebutuhan nyata untuk masing-masing unsur pelaksana disemua tingkat kepengurusan; 2) hasil penentuan jenis Pendidikan nonformal dan informal diolah dan dikaji oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan untuk menentukan skala prioritas; 3) Pendidikan nonformal dan informal tersebut diarahkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak terkait yang profesional. Kegiatan yang dilakukan melalui program perpustakaan adalah: 1) Meningkatkan budaya gemar membaca bagi anggota DWP dan keluarganya, dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan,

dan sudut baca; 2) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan pengelola perpustakaan, bekerja sama dengan pihak terkait dengan menyediakan buku-buku yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan anggota serta menyebarluaskan secara aktif ringkasan karya ilmiah, resensi buku, dan lain-lain yang bermanfaat bagi anggota.

Kriteria keberhasilan program kerja bidang Pendidikan adalah berdasarkan tujuan dan sasaran program kerja bidang Pendidikan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan program bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: 1) tertib pengelolaan administrasi bantuan Pendidikan murid, melalui monitoring dan evaluasi hasil bantuan Pendidikan; 2) Peningkatan jumlah peserta Pendidikan nonformal dan informal serta pelatihan para anggota DWP dan keluarganya; 3) Peningkatan mutu hasil Pendidikan dan pengelolaan administrasi pada lembaga-lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan; 4) Peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi tenaga pendidik pada lembaga-lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan; 5) Peningkatan jumlah buku/bahan pustaka; 6) Peningkatan minat baca para anggota dan keluarganya; 7) Peningkatan kemampuan dan pengetahuan tenaga pengelola perpustakaan Dharma Wanita Persatuan.

Salah satu wujud kepedulian organisasi adalah memberikan bantuan kepada putra putri anggota organisasi yang kurang mampu serta berprestasi. Pada saat pandemi covid melanda, pengurus organisasi juga berpartisipasi dengan memberikan bantuan Pendidikan sekolah kepada putra putri yang orang tuanya meninggal dikarenakan terpapar covid 19 hal ini bertujuan agar putra putri anggota organisasi yang telah menjadi yatim/piatu tidak sampai terhenti pendidikannya karena kurangnya biaya.



Gambar 4.4 Simbolis Pemberian Bantuan Pendidikan bagi yatim piatu

Sumber: dwpprovinsijatim,2021

Kegiatan dalam upaya peningkatan pengetahuan untuk para anggota organisasi Dharma Wanita Persatuan juga digalakkan melalui lomba cerdas cermat yang biasanya diadakan mendekati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar anggota mengetahui peraturan, kebijakan, anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi DWP hingga pengetahuan umum dengan lebih baik. Dengan adanya kegiatan lomba ini tentu membuat anggota lebih mempelajari secara mendalam AD ART organisasi serta dengan harapan dapat juga mensosialisasikannya kepada rekan anggota organisasi lainnya. Bukan tidak mungkin peserta lomba suatu saat akan menjadi ketua DWP di instansinya, harapannya tentu pengetahuan akan seluk beluk organisasi akan lebih baik serta dapat menjadi ketua yang mempunyai kualifikasi unggul untuk meneruskan memimpin sebuah organisasi.



Gambar 4.5 Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat istri ASN

Sumber: dwpprovinsijatim,2022

Bentuk lain peran serta pengurus organisasi DWP adalah pemberian alat peraga Pendidikan untuk sekolah-sekolah di bawah pengelolaan organisasi. Sebagai contoh kegiatan pemberian APE di taman kanak-kanak Dharma Wanita dan di UPT perlindungan dan pelayanan sosial. Macam bentuk alat peraga edukasi yang diberikan adalah balok titian, balok pinus, balok iqro', menara pelangi, intellegent stick, menjahit, digital caterpilor, menjahit sepatu, kereta huruf, kotak raba, sorting box truck, puzzle hewan, puzzle baca, leggo 456, timbangan kayu mix, jam awl/katak, jam mobil, set meronce, belajar berhitung, alat musik tradisional, tusuk geo.



Gambar 4.6 Pemberian bantuan APE di Kabupaten Trenggalek
Sumber: dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.7 Pemberian Alat Peraga Edukasi (APE) di Sidoarjo
Sumber: dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.8 Bantuan Alat Peraga Pendidikan di Kabupaten Tulungagung
Sumber: dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.9 Pemberian APE di Kab Sidoarjo
Sumber: dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.10 Pemberian APE di Pacitan

Sumber: dwpprovinsijatim,2021

Sebagai salah satu tugas dari pengurus organisasi Dharma Wanita Persatuan di Provinsi Jawa Timur untuk memastikan seluruh pengelolaan sekolah baik di tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA di bawah Dharma Wanita Persatuan maka secara berkala juga dilaksanakan kegiatan kunjungan kerja oleh ibu Ketua didampingi ketua bidang Pendidikan serta seluruh pengurus organisasi. Kedatangan para pengurus dengan tujuan melakukan evaluasi kinerja sekolah serta memastikan dan mengumpulkan informasi terkait apa saja kebutuhan dari sekolah sehingga apabila memungkinkan akan diwujudkan berupa bantuan Pendidikan agar tepat sasaran.

Bentuk lain dari kegiatan bidang pendidikan adalah penerbitan buletin secara berkala yang merupakan hasil para anggota Dharma Wanita Persatuan di daerah provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini juga merupakan penunjang untuk menggalakkan literasi dalam membaca, memahami serta menuangkannya dalam karya artikel yang mudah dipahami oleh pembaca.

Bentuk kehumasan dalam memanfaatkan sosial media dan mengikuti perkembangan di era digital adalah juga diadakannya bentuk *podcast* yang memiliki pengertian serangkaian berkas media digital yang dapat diterbitkan kapan saja dan dapat diunduh melalui sindikasi web (Wikipedia,2022). Sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet memudahkan para pendengarnya untuk dapat mengakses informasi terkait banyak hal, dan ini adalah hal yang positif untuk dapat mengenalkan kegiatan DWP bagi umum dan bermanfaat positif. Perempuan sebagai pelaku kegiatan juga dapat mengikuti zaman millennial yang notabene ditandai dengan pemahaman teknologi.



Gambar 4.11 Buletin karya anggota DWP yang diterbitkan secara berkala dan *podcast* DWP sebagai media komunikasi kehumasan



Gambar 4.12 Kunjungan Kerja DWP Provinsi Jatim

Sumber: dwpprovinsijatim,2021

Keberadaan sekolah di bawah naungan Dharma Wanita Persatuan juga memastikan tercapainya tujuan organisasi yaitu mensejahterakan kehidupan anggota organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya berkualitas bagi masyarakat di sekitar instansi.



Gambar 4.13 Pemberian Bantuan APE di Kediri

Sumber: dwpprovinsijatim,2021

Bentuk kegiatan lain selain pengelolaan sekolah Dharma Wanita Persatuan, pada pertemuan rutin anggota juga diberikan wawasan

bagaimana cara pola asuh oleh ibu yang tepat pada anak di usia dini hingga remaja dalam rangka mencegah perkawinan anak usia dini karena seperti diketahui bersama angka stunting di daerah semakin tinggi mengikuti pada tingkat tingginya pernikahan anak di usia dini. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menindaklanjutinya agar tercipta generasi yang sehat dan unggul, maka sudah menjadi tugas Dharma Wanita agar dapat turut serta mensosialisasikan pola asuh yang tepat bagi ibu ibu anggota DWP.

Sosialisasi penerapan gizi seimbang bagi anggota keluarga juga diberikan dengan mengundang narasumber spesialis di bidangnya. Hal ini juga diperlukan agar pemenuhan gizi yang seimbang turut serta menciptakan generasi emas dan unggul. Sebagai contoh pemahaman kebutuhan nutrisi seseorang mencakup makanan dari lima kelompok dan melengkapi pring menu dengan anjuran kesehatan. Menurut rekomendasi departemen kesehatan setengah dari piring seseorang harus terdiri dari buah dan sayuran dan setengahnya lagi harus terdiri dari biji-bijian dan protein. Kampanye “isi piringku” menggantikan slogan “4 sehat 5 sempurna” sehingga isi piringku berisi makanan pokok, sayuran, buah-buahan dan lauk pauk. Makanan pokok ukurannya sama dengan jumlah sayurannya selain tidak sesuai standar yang dapat mengakibatkan tubuh kekurangan gizi. Melakukan aktifitas fisik selama 30 menit per hari dan minum 8 gelas air sehari, yang mana dengan pola diet yang seimbang diharapkan kebutuhan gizi untuk tubuh dapat tetap terpenuhi sekaligus menjaga kesehatan dan mengurangi penyakit.



Gambar 4.14 Seminar Pola Asuh Anak dan Remaja
Sumber: dwpbpkad,2022



Gambar 4.15 Seminar Pola Asuh Anak dan Remaja dengan narasumber
 Unicef
Sumber: dwpbpkad, 2022

Pelaksanaan seminar diadakan oleh organisasi Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun tetapi tidak menutup kemungkinan topik yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari:

1. Kegiatan Usaha yang mana adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah untuk mendapatkan dana bagi organisasi melalui berbagai kegiatan usaha, seperti mengelola Gedung, kantin, toko, salon, bazaar dan lainnya.
2. Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Kreatif merupakan kegiatan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif berperan besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam usaha penciptaan dan peningkatan pendapatan lapangan kerja sebagai penggerak perekonomian keluarga. Ekonomi kreatif juga sangat berperan dalam menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan (sustainable economy).
3. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang mana erat berkaitan dengan pembangunan koperasi, seperti falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, Pendidikan, dan pembinaan.

Tujuan Program Kerja bidang Ekonomi DWP adalah: a) Mendapatkan dana bagi organisasi; b) menambah pengetahuan, ketrampilan dalam mencari peluang usaha; c) Meningkatkan pendapatan keluarga; d) Menciptakan lapangan kerja; e) Memasyarakatkan kehidupan berkoperasi.

Program Kerja Bidang Ekonomi adalah a) Profesionalisasi jenis-jenis usaha yang ditangani oleh Dharma Wanita Persatuan untuk menghimpun dana bagi organisasi; b) Pemberdayaan ekonomi produktif dan kreatif untuk meningkatkan kegiatan usaha secara berkesinambungan sehingga mampu berkreasi dan berinovasi

guna meningkatkan perekonomian keluarga; c) Memasyarakatkan kehidupan berkoperasi.

Pelaksanaan Program Kerja dilakukan melalui tahapan tahapan:

1. Mengidentifikasi sasaran program kerja;
2. Menentukan kegiatan;
3. Membuat jadwal dan anggaran biaya;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja, dan
5. Monitoring dan Evaluasi kegiatan. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan usaha secara terencana dan terarah untuk perolehan dana bagi organisasi, antara lain:
 - a. Mengidentifikasi kegiatan usaha yang dapat memberikan perolehan dana bagi organisasi seperti mengelola catering, fotocopy, sampai toko;
 - b. Mengembangkan jenis usaha yang berdasarkan kajian layak untuk diteruskan apabila dianggap perlu pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang professional;
 - c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memper-timbangkan mutu dan harga;
 - d. Memasarkan barang dan jasa baik pada lingkungan anggota maupun masyarakat. Mengelola kegiatan usaha secara profesional dengan:
 - 1) Menertibkan prosedur administrasi untuk terciptanya pengawasan melekat dengan menertibkan kebijaksanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana, menyempurnakan formulir, pengecekan stock barang dan toko;
 - 2) Membuat laporan kegiatan usaha secara teratur dengan mengikuti kaidah-kaidah akuntansi dan pedoman administrasi keuangan DWP;
 - 3) Memelihara dan meningkatkan mutu sarana, mutu pelayanan, dan mutu barang dan jasa yang dijual;

- 4) Meningkatkan kemampuan pengurus dan pegawai bidang ekonomi dalam mengelola usaha.

Memberdayakan ekonomi produktif dan kreatif dengan 1) Meningkatkan ketrampilan anggota melalui kegiatan pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan dalam mendorong inovasi untuk menghasilkan nilai tambah dan daya saing melalui kerja sama dengan bidang Pendidikan atau instansi terkait secara berkesinambungan; 2) Pendataan hasil ketrampilan, kerajinan, atau usaha anggota untuk disebarluaskan baik di lingkungan Dharma Wanita Persatuan maupun masyarakat serta melaporkan hasil pendataan kepada pengurus satu tingkat di atasnya; 3) Membantu memasarkan hasil karya anggota di toko yang dimiliki Dharma Wanita Persatuan atau pada kegiatan Bazar; 4) Menumbuh kembangkan kelompok usaha dalam permodalan, perijinan dan sertifikasi melalui bimbingan dan penyuluhan intensif.

Memasyarakatkan kehidupan berkoperasi dengan: 1) Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan bagi anggota dalam upaya meningkatkan kesadaran anggota akan pentingnya kehidupan berkoperasi; 2) Mendorong prakoperasi Dharma Wanita Persatuan menjadi koperasi yang berbadan hukum. Kriteria keberhasilan program kerja bidang ekonomi adalah: a) Peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari hasil usaha untuk membiayai kegiatan organisasi; b) peningkatan kualitas hasil usaha anggota; c) Peningkatan kegiatan Pendidikan ketrampilan; d)Peningkatan jumlah dan kesejahteraan anggota koperasi; d) Peningkatan jumlah dan kesejahteraan anggota koperasi; e) Peningkatan jumlah koperasi yang berbadan hukum.

Kriteria keberhasilan program kerja bidang ekonomi adalah:

1. Peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari hasil usaha untuk membiayai kegiatan organisasi,
2. Peningkatan kualitas hasil usaha anggota,
3. Peningkatan kegiatan pendidikan ketrampilan,
4. Peningkatan jumlah dan kesejahteraan anggota koperasi,

5. Peningkatan jumlah dan kesejahteraan anggota koperasi, 6. Peningkatan jumlah koperasi yang berbadan hukum.

Pelatihan ketrampilan yang menjadi kebutuhan dan dikembangkan pada DWP saat ini diarahkan pada konsep ekonomi kreatif yang mengedepankan pada industri kreatif. Hal ini sebagai upaya bentuk penerapan terhadap tujuan organisasi yakni pencapaian anggota yang mandiri secara ekonomi namun selaras dengan potensi yang dimiliki anggota serta sesuai dengan kultur di masyarakat.

Industri kreatif merupakan bentuk usaha yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, usaha ini akan terus berkembang dimana jika pelaku usahanya tidak pernah berhenti berkreasi, belajar dan selalu melakukan inovasi maka usaha akan terus berkembang. Sebagai bentuk usaha yang berbasis pada kreatifitas, maka hal ini sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Industri kreatif yang berhasil menciptakan nilai tambah ditentukan oleh kemampuan intelektual dari modal manusia (*human capital*). Profil kapasitas SDM anggota DWP melalui indikator pelaksanaan dan kebutuhan pelatihan selayaknya menggambarkan struktur pengelolaan/ pemberdayaan SDM anggota secara internal agar mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan eksternal yang terjadi dengan cepat dan tidak menentu serta mampu mempertahankan fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga maupun masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah. Untuk itu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, DWP seharusnya mampu menggunakannya sebagai alat untuk mengatasi lingkungan eksternal dan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kapasitas anggota sebagai prasyarat untuk tetap memelihara dan mempertahankan eksistensinya.

Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman sangatlah penting dalam pembentukan modal manusia, karena dengan Pendidikan akan membuat seseorang menjadi tahu, berpikir, bersikap, bertindak, merasakan, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan kondisi bonus demografi yang sedang terjadi

dimana komposisi penduduk produktif (usia kerja) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk tidak bekerja maka industri kreatif perlu digalakkan untuk mencapai kemandirian finansial anggota. Komposisi penduduk yang juga didominasi oleh perempuan maka kreativitas banyak menggunakan otak sebelah kanan yang diyakini didominasi oleh perempuan, dimana perempuan lebih dominan menggunakan perasaan dibandingkan laki-laki. Dengan kata lain peran perempuan kini semakin signifikan untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan industri kreatif. Mengingat kondisi sosial ekonomi, kultur masyarakat serta masih terbatasnya aktualisasi perempuan maka sejak awal dalam pengelolaannya sudah selayaknya apabila diarahkan pada sektor industri kreatif khususnya dalam mengantisipasi prediksi terjadinya bonus demografi. Ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif merupakan konsep kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreatifitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang selanjutnya industri kreatif ini dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual berupa hak kekayaan intelektual seperti hak paten, merk, cipta, royalti dan desain.

Organisasi Dharma Wanita Persatuan melalui pelaksanaan program kerja bidang ekonomi dan dalam upaya kemandirian ekonomi maka organisasi selalu berupaya untuk meningkatkan keterampilan serta mengembangkan potensi kewirausahaan anggotanya yang dapat menciptakan ketahanan ekonomi keluarga serta kemandirian setiap organisasi dalam hal keuangan. Berikut merupakan kegiatan usaha yang telah dikelola oleh masing-masing organisasi di DWP Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.2 Unit Usaha Bidang Ekonomi di DWP Provinsi Jawa Timur

Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
1. Toko Dharma Wanita Pajak dan Retribusi (BPRD) Lumajang	1. Kantin DWP Setda Lumajang 2. Kantin DWP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang 3. Kantin DWP dinas Kesehatan Kab Lumajang 4. Kantin DWP RSUD Dr. Haryoto Kab Lumajang		1. DWP Kab Lumajang mengadakan Bazar setiap ada kegiatan 2. Mengadakan pasar murah Ramadhan DWP Kab Lumajang
2. Toko Dharma Wanita	1. TMB Maharani 2. TBM Yosonegoro 3. TBM Ki Mageti DWP Kab Magetan		Mengadakan Bazar setiap ada kegiatan DWP kota Batu
3. Toko Sekretariat DWP Kota Kediri			
4. Toko Anggun DWP Kab Bojonegoro	Kantin Sedep Roso, DWP Kab Bojonegoro		Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Bojonegoro
5.	Kantin DWP Kab Pasuruan		Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Bojonegoro

	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
6.	Toko DWP Kab Magetan	Kantin Pemkab Kabupaten Magetan	Katering Puspo Roso DWP Kab Magetan	Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Magetan
7.	Toko Mutiara DWP Kabupaten Sampang	Kantin DWP Kabupaten Sampang	Katering Indah DWP Kab Sampang	Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Sampang
8.	Toko DWP Kabupaten Sumenep			
9.	Toko di Sekreatariat DWP Kabupaten Sidoarjo			Bazar bekerjasama dengan Kopwan Deltasari DWP Kabupaten Sidoarjo
10.				Bazar setiap ada kegiatan DWP di Kota Blitar
11.				Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab. Kediri
12.		Kantin Cikar, DWP DPRKP, dan CP Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP DPRKP dan CP Jatim
13.	Toko DWP UINSA Sby	Kantin Maqha DWP UINSA Sby		Bazar murah persiapan lebaran
14.	Toko Counter kecil, DWP Dinas PU Bina Marga Prov Jatim Sby	Kantin Anindya Cake, Cookies DWP Dinas PU Bina Marga		Setia pada kegiatan dilaksanakan bazar, DWP dinas PU Prov Jatim

	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
15.		Kantin dapur rakyat, DWP Sekretariat DPRD Provinsi Jatim	Katering Dapur Rakyat DWP Sekretariat DPRD Prov Jatim	Bazar produk UMKM, DWP Sekretariat DPRD Provinsi Jatim
16.	Toko DWP Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim	Kantin DWP Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Jatim	Kantin Tulip, Kantin Jagir, Kantin Teratai, Kantin Dahlia, Kantin Anggrek, Kantin Melati, Kantin Mawar DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jatim		
18.	Toko Melati DWP Bappeda Provinsi Jatim	Kantin Melati DWP Bappeda Provinsi Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP Bappeda Provinsi Jatim
19.	Toko DWP LLDIKTI Wil VII Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Sosial Provinsi Jatim
20.	Toko DWP Dinas Sosial Prov Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Sosial Provinsi Jatim
21.	Dinas PU SDA Prov Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas PU SDA Provinsi Jatim

	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
22.	Toko Dharma Wanita DWP BKD Prov Jatim	Kantin Dharma Wanita DWP BKD Provinsi Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP BKD Provinsi Jatim
23.	Toko Melati Dispora Provinsi Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dispora Provinsi Jatim
24.	Toko Mini DWP Kabupaten Ponorogo			
25.	Toko Barokah DWP BPBD	Kantin Barokah DWP BPBD Prov Jatim, Kantin Tempina DWP BPBD Prov Jatim		
26.				Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
27.	Toko Padi DWP BPKAD Provinsi Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
28.				Bazar DWP dinas Perkebunan Jatim

Sumber: Dwpprovjatim,2022

Salah satu bentuk kegiatan organisasi Dharma Wanita Persatuan melalui bidang ekonomi adalah terus berupaya menggali potensi anggota, mengembangkan semangat kewirausahaan dan memfasilitasi penjualan produk anggota melalui unit usaha atau toko. Bentuk keberlanjutan mengangkat produk hasil produksi anggota tidak hanya berhenti hingga dapat dipasarkan melalui

toko internal tapi juga hingga perolehan izin edar produk tersebut untuk dijual di toko eksternal. Berdasarkan undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib mempunyai izin edar. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Tentunya izin edar sangat penting untuk memastikan kualitas dan kepastian hukum atas produk yang dijual di pasar. Informasi terkait proses perizinan produk pangan olahan perlu diketahui oleh masyarakat baik pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Berkenaan dengan hal tersebut penting untuk mengetahui informasi terkait syarat dan prosedur pengurusan perizinan pangan olahan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses perizinan produk pangan olahan sebagai upaya mengembangkan potensi kewirausahaan anggota DWP dilakukan dengan memberikan seminar proses perizinan pangan olahan.

Sebagai salah satu upaya mengembangkan potensi anggota DWP melalui bidang ekonomi, pengurus bidang ekonomi juga membimbing anggota yang mempunyai produk berkualitas untuk mempatenkan produk tersebut sehingga dapat dijual dengan lebih luas. Perizinan yang realisasikan adalah pangan industri rumah tangga (PIRT) yaitu sertifikasi bagi industry yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan yang mana hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah.

Tahapan dalam mengajukan perizinan PIRT adalah: 1. Pemilik usaha atau produk login ke website OSS atau dating ke Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), langkah 2. Input kelengkapan data di OSS untuk mendapatkan NIB, langkah 3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT, 4. Mengklik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru.

Untuk mendapatkan penerbitan SPP-IRT maka harus mengunggah data, produk, upload rancangan label dan penyertaan komitmen tahapan ini hanya memerlukan satu hari kerja saja. Untuk tahapan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota memerlukan waktu sekitar tiga hingga enam bulan dengan tahapan pengawasan:

1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan, 2.
2. Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industry rumah tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi,
3. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Berikut adalah gambar tahapan perizinan pangan PIRT:



Gambar 4.16 Tahapan Perizinan PIRT

Sumber: istanaumkm.pom.go.id

Terdapat cukup banyak anggota organisasi DWP yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik dan lolos mendapatkan perizinan PIRT karena mendapat bimbingan dari DWP instansinya yaitu dari bidang ekonomi. Dapat dilihat di daftar Tabel 4.2 produk-produk yang telah memperoleh izin rumah tangga (PIRT) dan nomor halal dari MUI adalah sebanyak lima puluh ragam produk hasil produksi anggota DWP Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Jatim sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Produk UMKM Anggota DWP dan Produk Ber-PIRT

No	Asal UPT PPD	No Urut	Rincian Produk	PIRT/Halal Id			
1.	Malang Selatan	1	1. Bidaran Keju	206350702265723			
		2	2. Stik Keju	206350701265723			
2.	Malang Utara dan Batu Kota	1.	1. Kripik Jamur	204357902068924			
			2. Kripik Kuping				
			3. Kripik Jamur				
		3.	4. Kripik Brokoli				
			5. Kripik Wortel				
			6. Kripik Pisang				
			7. Kopi Alaz				
3.	Malang Kota	4	1. Bawang Hitam Segar	609357301007227			
		5	1. Sirup Blimbing Wuluh				
4.	Pasuruan	6	2. Sari Jahe				
			3. Sari Temulawak				
			1. Pastel Abon Daging				
5.	Sampang	7	1. Kopi Fine Robusta				
			2. Kopi Racik Cap Dewe				
6.	Bondowoso	8	3. Tape Crispy	510351101063223			
			7.		Sidoarjo	1. Bumbu Rujak Manis	35110003956360623
						1. Abon Lele	
8.	Lumajang	10	2. Sinom				
			3. Telur Asin				
			1. Keripik Pisang				
9.	Situbondo	11					

No	Asal UPT PPD	No Urut	Rincian Produk	PIRT/Halal Id
10.	Kediri	12	1. Sirup Doso Roso	
			2. Aneka Abon Manis dan Pedas	
			3. Coklat Angpao	
			4. Rengginang Mak'E	
			5. Madu Mongso Mak'E	
11.	Magetan		1. Nastar	
			2. Jahe Instan	
12.	Probolinggo	13	1. Kopi Apik	5103513001954
13.	Trenggalek	14	1. Keripik kulit ikan Patin (Krikitin)	502350301021527
			2. Ayam Lodho Bu Parti	203350301065628
			3. Sambel Pecel	Depkes SP
			4. Madumongso	140/1325/00
			5. Kripik Tempe Alelco	8113503010411028
			6. Kue Kering Nastar	205357101032228
14.	Pacitan	15	1. Kripik pisang manis	
			2. Kripik gurih	
			3. Kripik singkong gurih	214350101168
			4. Sambal Tuna Asap	
15.	Madiun	16	1. Pisang Kruwel	21435210429926
			2. Sambel Pecel Tondho Tresno	
16.	Ngawi	17	1. Madumongso Echo	
			2. Kripik Beluntas Kriuk	204352101078723
17.	Lamongan	18	1. Cemilan Djeng Lusy Unthuk Yuyu	2063524022009926
			2. Aneka sambal Djeng Lusy	35110000801820922

No	Asal UPT PPD	No Urut	Rincian Produk	PIRT/Halal Id
18.	Tuban	20	1. Kripik Ikan Bandeng 2. Kripik tulang muda sapi 3. Kripik cumi 4. Kripik ikan kerapu	
19.	Banyuwangi	21	1. Badoghan sambal kacang 2. Ting-ting kacang Gelissaji	209351002005927 211351001068928
20.	Mojokerto	22	1. Abon ikan lele 2. Abon ikan patin 3. Abon ikan bandeng 4. Abon ikan tuna	Halal id: 35110003042250500
21.	Ponorogo	23	1. Aneka kue kering nastar 2. Aneka kue kering kastangel 3. Sagu keju 4. Stik bunga telang dan seledri 5. Kentang serut	205350205024728 205350201024727 205350204024727 204350203024727
22.	Blitar		1. Madu Mongso 2. Rengginang dan gliti	Halal id: 35110001028501122 Halal id: 3511000123052112
23.	Tulungagung		1. Sambal bebek ireng perjuangan 2. Kremes krupuk rambak echo mantab sanget	60935040166128 201350401067428
JUMLAH		50		

Sumber: *dwpbapenda,2023*

Setiap produk dalam tabel diatas adalah murni hasil produksi anggota DWP di lingkungan instansi Provinsi Jawa Timur yang dibimbing sejak dari tahapan awal pengenalan ketrampilan produk hingga menjadi usaha yang mandiri dan berizin edar. Berikut adalah

beberapa contoh foto produk yang sudah PIRT hasil produksi anggota DWP diantaranya adalah Sambal Djeng Lusy, Pisang Kruel, Riri telur asin, Unthuk yuyu, sirup Doso Roso, dan kripis keripik pisang.



Gambar 4.17 Produk PIRT produksi anggota DWP

Sumber: *dwpprovinsijatim,2022*

Setiap produk tersebut diatas selain dipasarkan di toko-toko di daerah masing-masing juga dipasarkan ke Toko yang dikelola oleh DWP yang terletak di instansi masing-masing.

Sebagai contoh toko Melati yang dikelola oleh DWP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selain memenuhi kebutuhan pokok para karyawannya dan menyediakan jasa foto copy juga sebagai etalase produk yang dihasilkan. Contoh lainnya Toko Padi yang dikelola oleh DWP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim selain menyediakan kebutuhan sehari-hari para karyawan juga

menerima penitipan barang jualan yang dihasilkan oleh organisasi instansi instansi lainnya.

Dengan adanya kerjasama antar organisasi di setiap instansi maka akan memudahkan pemasaran setiap produk yang dihasilkan serta menumbuhkan semangat kewirausahaan masing-masing anggota. Sistem penitipan juga dianggap tidak akan membebani toko karena untuk barang yang tidak laku dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan kepada pemiliknya dan berganti dengan produk lainnya. Keberadaan toko juga sebagai media bagi pelaku usaha untuk mendapatkan saran masukan mengenai produk



Gambar 4.18 Toko Padi DWP

Sumber: dwpbkad,2022

Pembentukan unit usaha dari masing-masing organisasi DWP di instansi masing-masing diwujudkan sebagai media untuk menyalurkan potensi para anggota yang memiliki kemampuan menghasilkan produk baik makanan maupun produk lainnya, yang tentu saja kualitasnya tetap dalam pengawasan para pengurus organisasi dengan melakukan evaluasi secara berkala. Unit usaha yang sah selain sebagai media bagi para anggota bertransaksi juga sebagai media pembelajaran para pengurus organisasi itu sendiri karena dengan demikian memaksa pengurus untuk mau tahu dan mengelola secara profesional. Keuntungan memiliki unit usaha juga akan didapatkan penghasilan yang dapat digunakan sebagai pendanaan kegiatan organisasi.

Bentuk kegiatan ekonomi lainnya adalah diselenggarakannya pasar murah Ramadhan secara rutin setiap tahun yang mana kegiatan ini tidak hanya memfasilitasi para anggota untuk dapat menjual barang produksinya pada masyarakat tapi juga membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar instansi di bulan suci Ramadhan untuk sembako dan kebutuhan pokok yang murah karena para vendor yang didatangkan adalah dari produsen langsung sehingga harga yang ditawarkan juga harga dasar atau terjangkau.

Terselenggaranya pasar murah Ramadhan juga bekerja sama dengan vendor swasta serta instansi instansi terkait di provinsi Jawa Timur seperti Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pengadaan barang di pameran. Tentu hal ini juga menjadi apresiasi tersendiri oleh dinas yang mengisi bazar karena pihaknya juga sangat terbantuan untuk memasarkan produksinya ke masyarakat luas.



Gambar 4.19 Ibu Sekda sekaligus Ketua DWP Jatim menghadiri Pasar Murah Ramadhan

Sumber: dwpbpkad,2021



Gambar 4.20 Pasar Murah Ramadhan

Sumber: dwpbpkad,2021



Gambar 4.21 Bazar Ramadhan

Sumber: dwpbpkad,2022

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia anggota organisasi juga dapat ditingkatkan melalui pemberian pelatihan keterampilan seperti memasak, keahlian, pengolahan serta pengemasan produk rumah tangga hingga sosialisasi pemberian merk dagang dan pendaftaran hak merk produk industri rumah tangga.

Kebutuhan Peningkatan potensi anggota dapat digali dari identifikasi potensi anggota seperti melakukan observasi dan survey secara berkala terutama saat pertemuan rutin organisasi. Sebagai contoh diselenggarakan kegiatan pelatihan memasak yang bisa dilombakan dan hasilnya dapat dijual ke toko DWP dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. pelatihan tidak hanya dalam bentuk makanan tapi bisa juga kerajinan seperti pembuatan kain batik ecoprint, keramik, hingga kerajinan lainnya.



Gambar 4.22 Pelatihan Memasak oleh anggota DWP

Sumber: dwpbpkad,2022



Gambar 4.23 Pelatihan Ketrampilan Memasak

Sumber: dwpbpkad,2022



Gambar 4.24 Pelatihan Membuat Kerajinan Kain Teknik *Ecoprint*

Sumber: dwpbpkad, 2021

Sebagai bentuk keberlanjutan dari program kerja Dharma Waita Persatuan seperti pemberian pelatihan memasak, membuat kerajinan dan sebagainya, organisasi Dharma Wanita tetap melakukan pendampingan, pembinaan dan peningkatan pengetahuan dengan mendatangkan narasumber yang profesional di bidangnya agar produk yang dihasilkan internal anggota organisasi dapat lebih memiliki nilai jual di pasaran. Pemasaran melalui media sosial dan digital tentu sesuatu hal yang wajib dimasa era medsos ini, maka DWP memberikan pelatihan Teknik fotografi bagi anggota yang berminat mengikuti dan memiliki bidang usaha sehingga promosi yang dilakukan para anggota tetap memiliki kualitas yang baik dan menarik untuk dilihat calon konsumennya. Kegiatan ini dapat terjadi dengan Kerjasama yang baik dengan Dinas Koperasi dan UMKM sehingga dana kegiatan yang dibutuhkan dapat jauh lebih ekonomis namun kegiatan tetap bermanfaat.



Gambar 4.25 Pelatihan Teknik Fotografi Produk
Sumber: dwpbpkad,2021



Gambar 4.26 Pelatihan Fotografi Produk DWP
Sumber: dwpbpkad,2021

Sebagai tambahan pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan pemasaran secara digital produk internal anggota DWP, maka narasumber pelatihan fotografi juga disediakan dari para pakar di

bidangnya. Narasumber yang dihadirkan untuk pelatihan fotografi adalah orang yang memiliki ketertarikan di dalam bidang fotografi serta telah *handle* foto *food and beverage* di beberapa restoran ternama serta memiliki pengalaman bertanggung jawab pada *project* foto produk dengan PT. Rose Brand, UMKM binaan, dan *corporate* lainnya. Narasumber memiliki kemampuan dalam bidang fotografi, *adobe photoshop*, serta mampu mempresentasikan materinya dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya erat kaitannya dengan: 1) Ketahanan Keluarga yaitu wujud sebuah keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai, mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta meyakini bahwa keberhasilan adalah sebuah upaya yang memerlukan waktu, kerja keras, gigih, dan Tangguh; 2) Kepedulian Sosial adalah wujud kepedulian terhadap kondisi kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat; 3) Keanekaragaman budaya adalah pemahaman tentang nilai-nilai budaya bangsa yang beraneka ragam dengan dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika.

Tujuan Program Kerja Bidang Sosial Budaya adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga, baik lahir maupun bathin dalam upaya menuju keluarga Bahagia yang berkualitas, harmonis, berbudaya, dan berbudi luhur. Program Kerja bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan adalah: a) Ketahanan Keluarga; b) Kepedulian Sosial; c) Keanekaragaman Budaya. Pelaksanaan Program Kerja dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Ketahanan Keluarga adalah 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Meningkatkan pembangunan kesehatan dan perbaikan gizi, pembangunan kependudukan, pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana terutama pemahaman akan Pendidikan alat reproduksi, bahaya narkoba dan upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit; 3) Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai

bidang kehidupan pembangunan dengan meningkatkan peran dan kemandiriannya serta memonitoring dan mengevaluasi kesetaraan gender; 4) Meningkatkan pemahaman, penanaman nilai-nilai terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia; 5) Memasyarakatkan olah raga dan kesegaran jasmani; 6) Konsultasi keluarga dan advokasi untuk membela kepentingan anggota tentang KDRT.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan social adalah sebagai berikut: 1) Menumbuhkan sikap gotong-royong dan kepedulian social dalam segala bentuk serta kesiap-siagaan menghadapi bencana; 2) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan anggota; 3) Sosialisasi program penghijauan lingkungan dan menumbuhkan budaya cinta lingkungan, menjaga kebersihan, dan kesehatan lingkungan serta memasyarakatkan *reduce, reuse, recycle, and replace* (4R); 4) Membudayakan hidup hemat energi dan energi alternative serta sanitasi masyarakat di lingkungan keluarga dan masyarakat; 5) Meningkatkan kualitas kesehatan anak guna mewujudkan norma keluarga kecil Bahagia sejahtera melalui posyandu, bina keluarga balita dengan metode komunikasi informasi edukasi (KIE), dan bina keluarga remaja (BKR).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan wawasan keanekaragaman budaya antara lain: 1) Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan Bersama; 2) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Membudayakan perilaku hidup yang baik, santun, bertenggang rasa, menghargai sesama, tertib, dan taat hukum; 4) Meningkatkan apresiasi seni dan budaya dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian, adat istiadat serta budaya bangsa; 5) Membudayakan cinta produksi dalam negeri serta melaksanakan penyuluhan dan kampanye tentang dampak negatif budaya asing; 6) Mendukung upaya gerakan perempuan dalam membatasi tayangan TV yang menimbulkan dampak krisis akhlaq; 7) Menumbuhkan dan

meningkatkan upaya pemahaman dan penghargaan anggota dan masyarakat terhadap warisan budaya bangsa dengan cara membaca, mempelajari, memahami sejarah, memelihara, dan melestarikan peninggalan warisan leluhur dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kreasi budaya.

Berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan seperti tercantum pada program kerja, perlu dilakukan langkah-langkah yaitu: 1) Memilih bentuk-bentuk kegiatan yang berdasarkan hasil kajian atas kegiatan yang pernah dilakukan atau dalam bentuk lain yang lebih sesuai; 2) Menentukan prioritas dan kriteria yang akan menjadi sasaran program kerja; 3) Kaderisasi pengurus sesuai dengan minat, Pendidikan, waktu, usia, dan kemampuan; 4) Memilih pihak ketiga yang paling sesuai untuk diajak bekerja sama berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan; 5) Memilih bentuk kepedulian yang ada relevansinya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi; 6) Melakukan evaluasi pada setiap kegiatan.

Kriteria keberhasilan program kerja bidang Sosial Budaya adalah: a) Peningkatan perlakuan/pemahaman kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan keluarga anggota dan masyarakat; b) Penurunan dan peningkatan pemahaman tentang kenakalan remaja dan korban narkoba; c) Peningkatan jumlah anggota yang berolah raga; d) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan social; e) Peningkatan jumlah kelompok bina keluarga; f) Peningkatan kepedulian dan kelestarian lingkungan hidup; g) Peningkatan kerukunan hidup beragama; h) Peningkatan pemahaman dan wawasan nilai budaya bangsa; i) Penurunan angka kelahiran dan peningkatan peserta KB.



Gambar 4.27 Bantuan Paket Sembako peduli wabah covid
Sumber: dwpdispindikprov (2020)



Gambar 4.28 Bantuan Sembako Lebaran di Panti Asuhan
sumber: dwpbpkad,2022



Gambar 4.29 Bakti sosial penyerahan bantuan kepada veteran pejuang
Sumber: dwpbpkad (2021)



Gambar 4.30 Bantuan Sosial di Pondok Pesantren
Sumber: dwpbpkad (2022)



Gambar 4.31 Santunan Pendidikan Bagi Putra Putri *Cleaning service*, dan *security*

Sumber: dwpbpkad (2022)

Bidang sosial budaya dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan banyak memfokuskan pada nilai ketakwaan, cinta tanah air, keanekaragaman budaya, ketahanan rumah tangga serta isu-isu lingkungan. Pada ketahanan rumah tangga ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan agar setiap keluarga anggota organisasi dapat memperluas pengetahuannya seperti pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja. Hal ini diperlukan karena penerapan pola asuh yang lama terkadang kurang ideal untuk masa sekarang yang anak-anak lebih banyak dipengaruhi oleh gadget dan keterbukaan informasi di era digital. Narasumber yang didatangkan mempunyai strategi pola asuh yang ideal agar setidaknya dapat mencegah serta mengatasi kenakalan remaja dan perkawinan di usia dini. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bekerjasama dengan DP3AK atau dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan daerah Jawa Timur.



Gambar 4.32 Seminar Pola Asuh Anak dan Remaja yang tepat
Sumber:dwpbpkad,2022



Gambar 4.33 Seminar Pencegahan Kanker
Sumber:dwpbpkad,2022

Ketahanan keluarga di bidang kesehatan juga digalakkan dengan mensosialisasikan informasi pencegahan penyakit tertentu, sebagai contoh kanker serviks dan payudara yang mana lebih banyak mengintai perempuan. Sosialisasi cara pencegahan kanker di organisasi DWP dapat terselenggara karena bekerjasama dengan Yayasan kanker Indonesia, sehingga narasumber yang menjelaskan juga kompeten

di bidangnya. Ada banyak pengetahuan yang diterangkan untuk mencegah penyakit kanker dari rutin pemeriksaan kesehatan, pola gaya hidup yang dihindari hingga Langkah yang harus dilakukan bila didiagnosa mengalami penyakit kanker dari hasil pemeriksaan medis.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa kontribusi Dharma Wanita Persatuan cukup besar untuk turut menjaga kesehatan para anggota dan keluarga di wilayahnya. Bentuk kegiatan juga tidak memerlukan dana yang besar karena menggandeng institusi yang kredibel di bidangnya.



Gambar 4.34 Bantuan Sosial Sembako untuk rumah sakit darurat saat pandemi

Sumber: dwpprovinsi, 2021

Dharma Wanita Persatuan mengalami dinamika yang luar biasa dan pada setiap masa kepengurusan selalu ada tantangan sekaligus peluang yang menyertainya. Dimana pada tahun 2020 mengawali kepengurusan baru untuk periode 2019-2024 DWP dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak ringan yaitu pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia. Pandemi covid-19 membawa dampak yang sangat berat bagi seluruh komponen masyarakat termasuk DWP sebagai organisasi. Namun dengan tidak mengurangi semangat dan etos kerja dari seluruh pengurus dan anggota DWP, kiprah DWP terus dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan yang produktif dan solutif. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menggunakan teknologi komunikasi dengan berbagai platform yang tersedia baik berupa *zoom meeting* dan platform media komunikasi lainnya, hampir seluruh program kerja dan kegiatan dapat dilaksanakan meski dengan berbagai penyesuaian dan kendala yang tidak sedikit.

Saat pandemi terjadi kegiatan pertemuan rutin organisasi tetap berlangsung meskipun hanya dilaksanakan secara virtual atau daring dan memangkas beberapa poin kegiatan yang hanya bisa dilaksanakan secara luring. Kegiatan berbagi atau bakti sosial tetap diadakan meski dengan protokol ketat, sebagai contoh saat puncak pandemic covid terjadi, organisasi tetap menyalurkan bantuan yaitu pemberian sembako dan makanan pada tenaga kesehatan dan rumah sakit darurat yang ada. Hal ini juga menjadi fokus tersendiri bagi organisasi karena meski pandemic masih mengancam tetapi setiap anggota dan pengurus tetap semangat menebar kebaikan dan bantuan bagi yang membutuhkan. Sesuai dengan asas yang dianut oleh DWP yaitu Pancasila, saling tolong-menolong bagi sesama harus tetap dilaksanakan meski sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.



Gambar 4.35 Pemberian Masker di Pasar Tradisional dengan tetap mensosialisasikan protokol 5M

Sumber: dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.36 Pembagian Masker Gratis

Sumber: dwpprovinsijatim,2021

Di masa awal pandemi penerapan protokol kesehatan 5M di lingkungan masyarakat umum masih menjadi sebuah kendala tersendiri. Dalam kondisi inilah organisasi Dharma Wanita Persatuan hadir sebagai mitra pemerintah dengan ikut mensosialisasikan protokol kesehatan yaitu: 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Dan membatasi mobilitas.



Gambar 4.37 Senam Sehat Untuk Menjaga Kebugaran saat Pandemi

Sumber: dwpprovjatim,2021



Gambar 4.38 Pembagian Masker Gratis untuk Ojek Online

Sumber: dwpbpkadjatim,2021

Kegiatan pembagian masker di lingkungan instansi, warga sekitar, para pengemudi ojek online hingga pasar tradisional digalakkan oleh seluruh pengurus dan anggota organisasi. Pemberian bantuan makanan bagi tenaga kesehatan juga tidak luput dari perhatian organisasi dalam bidang bkati sosial, setidaknya hal ini dapat meringankan sedikit beban nakes yang pada saat itu sangat kewalahan akan banyaknya pasien yang terpapar covid-19. Kegiatan baksos donor darah juga rutin dilakukan dalam upaya membantu kelangkaan transfusi darah yang dibutuhkan pasien yang terpapar covid.



Gambar 4.39 Pemberian Donasi Kebutuhan Pokok bagi Nakes di RS

Sumber:dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.40 Pemeriksaan Swab Test secara rutin bagi anggota DWP

Sumber:dwbpkad,2020

Pada saat pandemi covid, kelangkaan pasokan darah untuk memenuhi kebutuhan pasien baik yang terpapar covid atau membutuhkan transfusi darah sangat terbatas dikarenakan masih besarnya resiko terpapar covid dan masyarakat masih takut untuk keluar rumah dan menyumbangkan darahnya. Sebagai mitra pemerintah tentu organisasi tidak tinggal diam dan mengadakan serta menghimbau seluruh anggota dan karyawan karyawan di instansi yang dinyatakan layak menyumbangkan darahnya untuk mendonorkan darah. Kegiatan baksos donor darah dapat terlaksana dengan Kerjasama antara DWP Provinsi Jatim dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di wilayah Jatim.



Gambar 4.41 Kegiatan Donor Darah bekerjasama dengan PMI
Sumber: dwpprovinsijatim,2021

Pada dini hari di awal bulan Desember 2021 dimana pandemi covid-19 yang belum juga terlewati, masyarakat Jawa Timur dikagetkan dengan musibah bencana erupsi gunung semeru di Lumajang, Jawa Timur. Musibah ini mengakibatkan ribuan jiwa penduduk di sekitar gunung semeru untuk mengungsi karena terjangan lahar dingin dan besarnya asap panas material vulkanik yang menyebar.

Pemerintah dengan sigap mendirikan pusat pengungsian bagi penduduk yang terdampak bencana, namun tetap dibutuhkan uluran donasi dari masyarakat terutama bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari untuk membantu meringankan beban pengungsi seperti pakaian dan makanan mengingat tidak semua pengungsi sempat menyelamatkan barang kebutuhan mereka di rumah saat terjadi erupsi.

Organisasi Dharma Wanita Persatuan melalui ketua dengan cepat tanggap mengedarkan surat yang ditujukan pada seluruh anggota di instansi di Jawa Timur dengan tujuan mengumpulkan donasi berupa perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pengungsi musibah erupsi. Hasil yang didapatkan segera didistribusikan oleh segenap pengurus organisasi dengan langsung mendatangi posko-posko pengungsian dan menyerahkan bantuan.

Rasa duka yang ditanggung oleh seluruh pengungsi tentu turut menjadi rasa duka bagi anggota organisasi, yang mana tentu ada diantara korban yang merupakan sanak saudara dari anggota. Dibutuhkan keikhlasan dalam tolong menolong dan saling gotong royong diantara masyarakat agar setiap musibah yang terjadi dapat teratasi dengan sesegera mungkin. Pemerintah melalui BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu sangat terbantu dengan donasi yang disalurkan oleh Dharma Wanita Persatuan yang juga merupakan mitra pemerintah.



Gambar 4.42 Bantuan Bencana Alam Gunung Semeru

Sumber:dwpprovinsijatim,2021



Gambar 4.43 Pemberian Bantuan Kebutuhan Pokok bagi Pengungsi Bencana Alam Gunung Semeru

Sumber: dwpprovinsijati, 2021

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Kementerian pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep rumah pangan lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas serta berbasis kampung dan desa atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip rumah pangan

lestari disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain itu KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, kantor dan lainnya). Lahan terbuka hijau mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Prinsip dasar KRPL adalah:

1. Pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan,
2. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal,
3. Konservasi sumber daya genetic pangan (tanaman, ternak, ikan), dan
4. Menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan KRPL sejalan dengan visi misi DWP khususnya di bidang sosial budaya yaitu budaya cinta lingkungan dan ketahanan pangan.

Kegiatan dalam tema ketahanan pangan rumah tangga menjadi fokus tersendiri mengingat pada masa itu masyarakat dianjurkan untuk tetap berada dirumah namun tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan bergizi tinggi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan ketahanan pangan adalah dengan menggalakkan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan pemanfaatan lahan di area kantor untuk menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan baik untuk makanan dan obat-obatan salah satunya adalah konsep penanaman dengan media hidroponik.

Tujuan dari KRPL adalah:

1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari,
2. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan diperkotaan maupun di pedesaan

untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran, dan tanaman obat keluarga (TOGA),

3. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan,
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri

Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sumber pangan secara berkelanjutan dengan pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dalam suatu kawasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, peningkatan pendapatan keluarga, meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. Dimana diperlukannya KRPL berlandaskan pada prinsip ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi sumber daya genetik tanaman pangan untuk masa depan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat. Diperlukan kerjasama dengan dinas pertanian untuk mendapatkan benih/bibit yang akan ditanam di pekarangan rumah rumah anggota.

Sasaran dari kegiatan KRPL adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial yang bermartabat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Diperlukan sosialisasi, menggerakkan anggota untuk dapat menciptakan KRPL di lingkungan rumah anggota. Output yang didapat dari kegiatan ini adalah: a) tersedianya sumber pangan dan gizi keluarga yang diperoleh dari pemanfaatan pekarangan, b) meringankan biaya kebutuhan rumah tangga dalam penyediaan bahan pangan lokal, c) menumbuhkan produktifitas sumber daya manusia. Strategi



V

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Eksistensi pemberdayaan perempuan dan kontribusinya pada masyarakat Jawa Timur

Organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang keberadaannya sangat penting dan diperlukan dalam membina sumber daya perempuan di masing masing instansi pemerintahan. Dengan program kerja untuk menyejahterakan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, DWP menetapkan program unggulan yang didefinisikan sebagai program yang menyentuh kebutuhan langsung anggota, keluarga, dan masyarakat serta mendorong kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi, berpengetahuan luas, dan siap berperan serta secara luas dalam berbagai bidang yakni Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dengan pemberdayaan, perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan perannya dalam merencanakan sendiri perubahan-perubahan yang dikehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik (Marditama, et.al, 2021).

Program unggulan organisasi dilaksanakan secara terintegrasi melalui aliansi strategis dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta yakni pembentukan *center of excellence* pemberdayaan perempuan dan keluarga. Melalui penyelenggaraan program unggulan dimaksud diharapkan dapat terwujud pembangunan keluarga sejahtera sekaligus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam peran publik. Hal ini terlihat dari jawaban para informan saat wawancara mendalam dengan penulis.

“Sangat penting ya karena merupakan organisasi kemasyarakatan yang fungsinya menghimpun dan membina istri aparatur sipil negara dalam segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan keluarga, dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yang mana kegiatannya melalui bidang Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya” (GHT, 25/8/22).

“Organisasi DWP penting karena ibu-ibu anggota DWP mempunyai kewajiban dalam mensukseskan kehidupan keluarga sekaligus harus mampu memberikan support dukungannya sebagai pendamping suami yang aparatur sipil negara sehingga dibutuhkan sebuah organisasi yang mampu meningkatkan sumber daya manusia anggotanya dalam hal ini adalah DWP agar satu visi sebagai istri ASN yang unggul dan professional” (AWW,18/8/22).

“Organisasi ini adalah sebagai ajang silaturahmi juga untuk meningkatkan sumber daya manusia serta kapasitasnya terutama sebagai anggota, keluarga, dan tentunya akan berdampak bagi masyarakat” (FBS, 27/02/23).

“Organisasi ini sangat penting karena menyamakan persepsi pola pikir antara istri aparatur sipil negara untuk kesejahteraan keluarga dan pembangunan” (RS,12/2/23).

“Sangat penting sekali karena dengan terbentuknya organisasi DWP maka ada wadah untuk perkumpulan para istri aparatur sipil negara” (S,10/02/23).

Berdasarkan wawancara dari para informan dapat dianalisa sebagai berikut:

Dharma Wanita Persatuan melaksanakan seluruh program kerjanya harus bersinergi dan selaras dengan program pemerintah serta bekerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait dalam mengimplementasikan program kerja berdasarkan pada rencana strategis 2019-2024 untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional dengan cara memperkuat kapasitas individu dan ketahanan keluarga sebagai upaya membangun kemandirian menuju organisasi yang modern dan profesional. Pemberdayaan perempuan sendiri adalah menanamkan nilai nilai yang bertujuan untuk mengembangkan martabat dan potensi diri dari perempuan secara individual agar mampu menolong mereka sendiri lebih mandiri (Sulistiyowati, 2016)

“Peran DWP dalam pemberdayaan perempuan pastinya mengutamakan pembinaan sumber daya manusia untuk seluruh pengurus dan anggotanya “ (GHT,25/8/22).

“Peranan Dharma Wanita Persatuan dalam pemberdayaan perempuan terutama bagi anggotanya ada beragam aktifitas sebagai contoh yaitu: 1. Memberikan dukungan pelaksanaan di lapangan terhadap program-program pemerintah, 2. Memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada anggota DWP dan masyarakat perempuan agar lebih berdaya dalam perekonomian, 3. Memberikan pembinaan-pembinaan tentang peran perempuan dalam keluarganya, peran perempuan dalam masyarakat, dan peran perempuan sebagai istri aparatur sipil negara” (AWW, 18/8/22).

“Peranan DWP bagi pemberdayaan perempuan tentu khususnya anggota sangatlah besar sesuai dengan visinya yaitu menjadi organisasi istri aparatur sipil negara yang professional untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional serta misi DWP salah satunya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing global serta mensejahterakan anggota, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu program kerja dan kegiatannya selalu disusun sesuai dengan visi

misi dan tujuan Dharma Wanita Persatuan dan disesuaikan Resntra DWP” (FBS, 27/02/23).

“DWP sangat berperan karena dengan pemberdayaan perempuan ada dalam bidang sosial budaya yang juga masuk program kerja DWP. Pemberdayaan perempuan banyak digaungkan melalui organisasi Dharma Wanita Persatuan dari organisasi yang memiliki unit usaha hingga pelaku industri rumah tangga banyak dijalankan oleh anggota organisasi DWP” (RS,12/02/23).

Hal ini sesuai dengan temuan yang terjadi di lapangan yang mana sebagai upaya memfasilitasi produk buatan anggota organisasi DWP dan sebagai upaya menambah keuangan organisasi melalui unit usaha yang sah maka mayoritas DWP di Provinsi Jawa Timur memiliki Toko dan mempunyai Produk internal anggota bahkan sudah memiliki izin PIRT. Berikut tabel yang menjelaskan toko dan bentuk unit usaha yang telah berdiri di lingkungan DWP Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5.1 Unit Usaha Bidang Ekonomi di DWP Provinsi Jawa Timur

No	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
1.	Toko Dharma Wanita Pajak dan Retribusi (BPRD) Lumajang	1. Kantin DWP Setda Lumajang 2. Kantin DWP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang 3. Kantin DWP dinas Kesehatan Kab Lumajang		1. DWP Kab Lumajang mengadakan Bazar setiap ada kegiatan 2. Mengadakan pasar murah Ramadhan DWP Kab Lumajang

No	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
		4. Kantin DWP RSUD Dr. Haryoto Kab Lumajang		
2.	Toko Dharma Wanita	1. TMB Maharani 2. TBM Yosonegoro 3. TBM Ki Mageti DWP Kab Magetan		Mengadakan Bazar setiap ada kegiatan DWP kota Batu
3.	Toko Sekretariat DWP Kota Kediri			
4.	Toko Anggun DWP Kab Bojonegoro	Kantin Sedep Roso, DWP Kab Bojonegoro		Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Bojonegoro
5.		Kantin DWP Kab Pasuruan		Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Bojonegoro
6.	Toko DWP Kab Magetan	Kantin Pemkab Kabupaten Magetan	Katering Puspo Roso DWP Kab Magetan	Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Magetan
7.	Toko Mutiara DWP Kabupaten Sampang	Kantin DWP Kabupaten Sampang	Katering Indah DWP Kab Sampang	Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab Sampang
8.	Toko DWP Kabupaten Sumenep			

No	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
9.	Toko di Sekreatariat DWP Kabupaten Sidoarjo			Bazar bekerjasama dengan Kopwan Deltasari DWP Kabupaten Sidoarjo
10.				Bazar setiap ada kegiatan DWP di Kota Blitar
11.				Bazar setiap ada kegiatan DWP Kab. Kediri
12.		Kantin Cikar, DWP DPRKP, dan CP Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP DPRKP dan CP Jatim
13.	Toko DWP UINSA Sby	Kantin Maqha DWP UINSA Sby		Bazar murah persiapan lebaran
14.	Toko Counter kecil, DWP Dinas PU Bina Marga Prov Jatim Sby	Kantin Anindya Cake, Cookies DWP Dinas PU Bina Marga		Setia pada kegiatan dilaksanakan bazar, DWP dinas PU Prov Jatim
15.		Kantin dapur rakyat, DWP Sekretariat DPRD Provinsi Jatim	Katering Dapur Rakyat DWP Sekretariat DPRD Prov Jatim	Bazar produk UMKM, DWP Sekretariat DPRD Provinsi Jatim
16.	Toko DWP Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim	Kantin DWP Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jatim

No	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Jatim	Kantin Tulip, Kantin Jagir, Kantin Teratai, Kantin Dahlia, Kantin Anggrek, Kantin Melati, Kantin Mawar DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jatim		
18.	Toko Melati DWP Bappeda Provinsi Jatim	Kantin Melati DWP Bappeda Provinsi Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP Bappeda Provinsi Jatim
19.	Toko DWP LLDIKTI Wil VII Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Sosial Provinsi Jatim
20.	Toko DWP Dinas Sosial Prov Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Sosial Provinsi Jatim
21.	Dinas PU SDA Prov Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas PU SDA Provinsi Jatim
22.	Toko Dharma Wanita DWP BKD Prov Jatim	Kantin Dharma Wanita DWP BKD Provinsi Jatim		Bazar setiap ada kegiatan DWP BKD Provinsi Jatim
23.	Toko Melati Dispora Provinsi Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dispora Provinsi Jatim
24.	Toko Mini DWP Kabupaten Ponorogo			

No	Nama Toko	Kantin	Katering	Kegiatan Ekonomi
25.	Toko Barokah DWP BPBD	Kantin Barokah DWP BPBD Prov Jatim, Kantin Tempina DWP BPBD Prov Jatim		
26.				Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
27.	Toko Padi DWP BPKAD Provinsi Jatim			Bazar setiap ada kegiatan DWP Dinas Kehutanan Provinsi Jatim
28.				Bazar DWP dinas Perkebunan Jatim

Sumber: Dwpprovjatim,2022

Ada beberapa bentuk unit usaha yang dijalankan oleh masing masing Dharma Wanita Persatuan di instansi seperti Toko, Kantin bersama, Katering, dan Koperasi yang mana dikelola secara bersama oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan di instansi masing masing tentunya dengan harapan tercipta kemandirian secara ekonomi dalam sebuah organisasi sehingga pendanaan tidak hanya mengharapkan dari sumbangan sukarela tidak mengikat.

Hal ini juga didukung dengan keterangan dari informan bahwa:

“perempuan melalui organisasi Dharma Wanita Persatuan selalu ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anggota untuk menambah keuangan keluarga dan organisasi” (S,10/02/23).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Informan dapat disimpulkan bahwa keinginan setiap organisasi DWP untuk tercipta kemandirian sangatlah besar, hal ini terlihat dari besarnya jumlah unit usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota DWP. Peningkatan ketrampilan dengan secara aktif mengikuti pelatihan-

pelatihan bekerjasama dengan dinas Koperasi dan UMKM seringkali dilaksanakan.

Sejalan dengan pendapat dari Grant (1988) dalam artikelnya *Women as Manager: What they can offer to Organisation* yang menyatakan ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam menunjukkan eksistensi wanita yaitu *communication dan cooperation*. Organisasi Dharma Wanita Persatuan memungkinkan perempuan untuk secara aktif berkomunikasi dan melakukan proses kerjasama dengan pihak eksternal organisasi agar dapat memudahkan menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Ada banyak kegiatan dari pertemuan rutin organisasi yang dapat terlaksana dengan bantuan dari instansi lain sebagai contoh narasumber pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Dinas Pertanian yang bekerjasama dalam hal ketahanan pangan dengan pemberian bibit tanaman serta mendukung Gerakan gemar ikan dengan turut serta menyebarkan ikan budidaya lokal Jatim di perairan sungai Kalimas agar turut serta menstabilkan harga ikan.



Gambar 5.1 Pelatihan Ketrampilan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan
UMKM

Sumber: *dwpjatim,2021*

Pemberdayaan perempuan melalui industri kreatif dapat meningkatkan status sosial, status ekonomi masyarakat, kualitas hidup pribadi dan melibatkan perempuan dalam pembangunan dimana jenjang Pendidikan yang tinggi merupakan instrument yang efektif dalam pemberdayaan perempuan disertai budaya dan kreatifitas (Marditama T, C. Solihah, L. Fitria,2021. Hal ini sejalan dengan informan ke 4 (RS, 2022) bahwa “Mayoritas anggota DWP baik di kota besar dan daerah adalah ibu-ibu dengan jenjang Pendidikan minimal sarjana strata satu”.



Gambar 5.2 Pelatihan Kewirausahaan pembuatan sabun ramah lingkungan
Sumber: dwpprovjatim, 2022

Pemberdayaan juga adalah memanusiakan dan mendorong seseorang melakukan hak asasinya melalui aktifitas yang diberikan kepada perempuan meliputi pelatihan, ketrampilan, bahkan Pendidikan supaya perempuan mampu mengetahui dan dapat menyalurkan keahlian maupun potensi yang dimilikinya sehingga berkontribusi pada pembangunan di Indonesia. Sama halnya dengan kegiatan pendirian unit usaha di organisasi DWP sedikit banyak tentu turut menggerakkan roda perekonomian di daerah masing-

masing. Menyebabkan peran perempuan anggota DWP menjadi lebih optimal baik dalam kaitan pemberdayaan dan perannya dalam masyarakat sekitarnya.



Gambar 5.3 Toko Padi DWP

Sumber: dwpprovjatim, 2021

Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar yang terdampak kondisi perekonomian yang tidak stabil dikarenakan pandemi dan harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, organisasi DWP bekerjasama dengan para vendor dan produsen serta unit usaha internal secara rutin mengadakan pasar murah Ramadhan yang diadakan menjelang bulan Ramadhan agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau disbanding harga di pasaran. Langkah ini akan meringankan beban masyarakat sekitar dalam mencari kebutuhan menyambut bulan suci serta bagi organisasi keuntungan unit bisnis serta biaya sewa stan bagi vendor akan menambah pemasukan organisasi dan membantu menambah kas organisasi. Kemandirian adalah hal yang terus ditanamkan agar organisasi tidak memberatkan institusi asal.



Gambar 5.4 Pasar Murah Ramadhan oleh DWP

Sumber: dwpprovjatim, 2021

Organisasi diyakini sebagai pemersatu dimana berbagai kepentingan, aspirasi, dan harapan individu maupun kelompok masyarakat terkadang bisa jadi tidak disampaikan dengan baik karena apabila tidak ada perhimpunan akan terkesan individu berjalan sendiri-sendiri. Keberadaan sebuah organisasi tentu dipertanyakan dengan seberapa banyak dan berkualitas kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Hadiwijono (2005:148) eksistensi berasal dari kata eks yaitu keluar dan sistensi yaitu menempatkan sehingga disimpulkan secara personal manusia sadar bahwa dirinya ada dan keberadaannya perlu diketahui oleh lingkungan luar. Begitu pula sebuah organisasi keberadaannya akan tampak apabila dikenal tidak hanya secara internal instansi tapi kiprah organisasi juga dapat diketahui oleh eksternal organisasi atau lingkungan masyarakat luar instansi dengan program yang bermanfaat. Eksistensi organisasi DWP cukup besar yang mana hal ini ditunjang oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“eksistensi DWP sangat manfaat karena menyentuh isu-isu yang sedang berkembang sebagai contoh saat pandemi covid, pengurus

secara sukarela dan bersama-sama memberikan sebagian dana untuk memberikan atensi berupa makanan sehat bagi anggota yang terpapar. DWP Provinsi di Jatim juga bekerjasama dengan Yayasan kanker Indonesia yang perhatian dengan kondisi kesehatan para anggotanya dengan menyelenggarakan kegiatan bhakti sosial sadari kesehatan dengan pengecekan mamografi dan pap smear gratis. Kegiatan pasar murah Ramadhan juga secara rutin diselenggarakan bekerjasama dengan vendor-vendor agar mendapatkan harga dasar produk yang lebih murah sehingga selain membantu anggota untuk tetap aktif dan memenuhi kebutuhannya juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar kantor instansi masing masing” (FBS, 27/02/23).

Organisasi adalah juga sebagai media pembelajaran dimana setiap individu dapat saling bertukar pikiran, untuk saling memberi serta menerima, saling bertukar pikiran dan informasi sehingga koordinasi antara yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan baik. Perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh setiap anggota kepada anggota lainnya akan memunculkan rasa kesatuan dan memiliki organisasi karena tentu setiap anggota mempunyai harapan bahwa organisasi akan memberikan manfaat.

“Program unggul yang ada di DWP menurut saya ya tergantung bidang-bidangnya ya sebagai contoh bidang Pendidikan unggulnya mengutamakan menuntaskan Pendidikan di bangku sekolah bagi putra-putri anggota serta penyebaran informasi yang bermanfaat sampai pada sudut baca yang tersedia. Bidang ekonomi banyak berperan pada pembentukan kemandirian anggota dalam hal pemasukan penghasilan tambahan maka program unggulannya adalah pendirian toko di masing2 instansi yang dapat menunjang keuangan organisasi sekaligus media anggota memasarkan produk industri rumah tangga. Bidang sosial budaya ya pembinaan rohani, PHBS, Germas.. ini mendasar ya” (GHT,25/08/22)

Keeksian kegiatan organisasi dapat terlihat secara transparan melalui media sosial dari masing masing organisasi. Masyarakat luas dapat melihat kegiatan organisasi Dharma Wanita Persatuan yang bermanfaat dan bahkan mengetahui peluang yang ditawarkan oleh



VI

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan

Setiap organisasi pastinya memiliki kendala tersendiri dalam menjalankan kegiatannya yang mana hal ini berpotensi menyebabkan ketidak optimalan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan

“Permasalahan yang kerap kali menjadi kendala kegiatan organisasi berjalan secara optimal adalah masalah dana yang terbatas, tapi hal ini tidak menjadi penghalang besar untuk mencapai tujuan organisasi yaitu menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya karena dalam setiap kegiatan kita dapat bersilaturahmi, bertambahnya pengetahuan pada setiap pertemuan rutin” (GHT,25/08/22).

Permasalahan yang bisa dikatakan klise terjadi pada setiap organisasi adalah kurangnya dana untuk menjalankan kegiatan tetapi

informan optimis bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala besar karena pengetahuan dapat tetap bertambah dengan memaksimalkan potensi anggota untuk dapat berbagi ilmu yang dimiliki. Sebagai contoh memiliki anggota dengan profesi dokter maka dapat *sharing* ilmu kepada anggota lainnya pada saat pertemuan rutin, begitu pula anggota dengan profesi lainnya. Permasalahan dana juga diungkapkan oleh informan lainnya.

“Keterbatasan anggaran ya, untuk melaksanakan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu perlu ada kebijakan khusus tentang anggaran DWP ini mengingat peran DWP sangat strategis dalam pembangunan manusia seutuhnya” (AWW,18/08/22)

“Permasalahan ya klise ya amba, permasalahan minimnya dana dan kurangnya pemahaman dari ketua DWP tentang bagaimana organisasi DWP sebagai center of excellence sehingga akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan dan pengelolaan yang tidak sesuai tujuan DWP yang akan meningkatkan sumber daya manusia, mensejahterakan khususnya anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya” (FBS,27/02/23).

Pendanaan organisasi DWP menurut AD ART tahun 2019 yang bisa digunakan berasal dari empat sumber yaitu: 1. Iuran anggota, 2. Bantuan pemerintah, 3. Sumbangan lain yang tidak mengikat, 4. Usaha lain yang sah.

Strategi yang dapat dipakai untuk mengatasi keterbatasan baik kurangnya sumber daya manusia dan manusia adalah dengan melakukan kerjasama dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga lebih meringankan beban. Raharja (2018) mengungkapkan pada dasarnya hakikat kolaborasi adalah kerjasama yang dijalin antar organisasi dalam mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual.

DWP telah banyak melakukan kerjasama dengan instansi lain sebagai contoh Dinas Perpustakaan dapat bekerjasama dengan DWP yaitu dengan memberikan bantuan berupa buku-buku untuk mengisi sudut baca, Dinas Pertanian bekerjasama dengan organisasi dengan

menggalakkan Gerakan KRPL Kawasan rumah pangan lestari di lingkungan rumah anggota, Dinas Perikanan dengan menyebarkan ikan lokal Jawa Timur agar tercipta kestabilan harga jual ikan dan Gemar Ikan. Dinas Kesehatan dan rumah sakit daerah dalam memberikan sosialisasi terkait kesehatan, Yayasan Kanker Indonesia untuk penyuluhan kesehatan, Dinas Pertanian untuk membantu menawarkan hasil alam pada anggota dalam bentuk bazar, dan lain sebagainya.

Manurut Fendt (2010) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi: (1) disebabkan tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu dengan seorang diri tanpa bantuan pihak lain, (2) tujuan berkolaborasi dimana keuntungan akan diperoleh lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendirian, (3) organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga dapat menekan menjadi lebih besar dan memiliki daya saing

Permasalahan lainnya diungkapkan oleh informan yaitu kendala yang mungkin terjadi dikarenakan terdapat pergantian ketua maupun pengurus karena membutuhkan waktu dalam menyamakan persepsi dan beradaptasi kembali antar pengurus yang baru dan lama.

“Bisa jadi karena adanya pergantian pengurus ya” (S, 10/02/23).

Kurang pemahannya ketua masalah manajemen organisasi DWP juga menjadi masalah tersendiri yang mana diungkapkan oleh informan ibu FBS pentingnya untuk ketua memahami organisasi secara tepat agar dapat menjadi *center of excellence* baik bagi anggota dan lingkungan sekitarnya.

DWP sebagai organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia dan sebagai organisasi istri aparatur sipil negara mempunyai visi misi yang bertujuan agar menjadi organisasi yang berkualitas, modern dan professional serta mempunyai potensi besar untuk lebih memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota, keluarga dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan

program kerja atau kegiatan kegiatannya harus sejalan bersinergi/ selaras/sejalan dengan program pemerintah dan berkelanjutan.

Disampaikan oleh informan FBS “Organisasi DWP mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan perannya agar menjadi *center of excellence* yang *responsive* gender bagi para anggota, keluarga, dan masyarakat”. Pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan oleh seluruh elemen masyarakat dan harus dapat dipastikan bahwa setiap anggota, keluarga, dan masyarakat haknya akan terpenuhi baik itu laki-laki, perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.

Diharapkan melalui DWP yang *responsive* gender akses bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di segala bidang pembangunan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki dapat terwujud. Karena selama ini perempuan dipandang sebagai kaum yang termaginalkan yang hanya dianggap cukup melaksanakan urusan rumah tangga. Perempuan juga seringkali berperan ganda sebagai pencari nafkah namun hasil pendapatannya hanya dianggap sebagai tambahan.

Di era globalisasi sangat perlu adanya perubahan sudut pandang bahwa perempuan juga harus diberi kesempatan untuk berkarya sehingga isu kesenjangan gender bagi kehidupan lelaki dan perempuan dapat teratasi, juga diperlukan strategi mengatasinya sehingga tidak ada lagi istilah bahwa perempuan hanya sebagai teman wingking, perempuan dinomor duakan dalam mendapat Pendidikan, tetapi peran perempuan dan lelaki sekarang adalah setara berdampingan tanpa melupakan kodratnya masing-masing. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan DWP di Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Siaga SDM, untuk meningkatkan kualitas SDM serta untuk turut berkontribusi mencerdaskan bangsa yaitu dengan penyediaan ruang ramah anak yang merupakan inovasi dan pengembangan dari ruang laktasi dan sudut baca. Maksud dengan adanya ruang ramah anak adalah agar ibu-ibu anggota DWP tetap dapat mengikuti pertemuan rutin tanpa kuatir akan keadaan putra/

putrinya karena sudah diberikan tempat aman, nyaman, dan beredukasi. Hal ini karena DWP juga sangat memperhatikan kebutuhan anggota dan keluarga yang masih balita. Ruang ramah anak ini juga dilengkapi dengan ruang laktasi, tempat bermain, dan sudut baca. Ruang laktasi dimaksudkan untuk mengakomodasi hak anak akan pemenuhan pemberian ASI agar tidak terhambat. Ruang ramah anak juga menyediakan dokter dari anggota DWP agar sang ibu dapat mengetahui tumbuh kembang dan gizi putra/putrinya. Tersedianya ruang bermain yang edukatif terintegrasi dengan sudut baca/ perpustakaan mini dapat menepis rasa bosan sang putra/putri saat mengikuti ibunya berkegiatan DWP.

Inovasi ruang ramah anak yang terintegrasi dengan ruang laktasi, tempat bermain, dan sudut baca menjadi salah satu ikon penting penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dan menjadi inovasi tertinggi, dan menjadi daya Tarik tersendiri bagi tim penilai dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meninjau dan menilai secara langsung.

2. Tersedianya fasilitas ruang sudut baca sinergi, fasilitas ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dan menumbuhkan minat baca anggota dan keluarga DWP sehingga menjadi cerdas dan berwawasan luas. Agar anggota dan keluarga lebih gemar membaca terutama bagi kaum wanita, maka bahan bacaan yang disediakan di ruang sudut baca sinergi lebih diutamakan topik/ tema perempuan dan anak disamping topik/tema lainnya dan diperbanyak jumlah buku yang tersedia. Selain berfungsi sebagai ruang baca, ruang ini berfungsi sebagai ruang pameran hasil karya anggota sebagai salah satu apresiasi terhadap upaya kreatifitas anggota DWP.
3. Gerakan pemerhati Pendidikan, merupakan Gerakan yang membantu pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka putus sekolah dan pemenuhan hak anak akan pelayanan

dasar Pendidikan. Gerakan pemberian santunan Pendidikan ini diberikan kepada putra/putri di lingkungan instansi DWP baik dari tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

4. Kegiatan kegiatan lain yang dilaksanakan adalah sosialisasi, ceramah, sarasehan, pelatihan, pemberdayaan bagi anggota, keluarga, dan masyarakat juga anggota yang sudah lansia atau telah purna. Kegiatan-kegiatan ini didahului dengan melakukan pendataan potensi SDM untuk mengetahui minat anggota sehingga dalam menyusun program-program kerjanya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan.
5. Siaga Sehat, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan memberi fasilitas pelayanan dasar kesehatan serta untuk menumbuhkan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan kantor dan keluarga yang diwujudkan dengan:
 - a. Ruang Kawasan Tanpa Rokok
Merupakan salah satu upaya bentuk perlindungan bagi anggota dan karyawan terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena gangguan asap rokok. Namun begitu perokok tetap disiapkan ruang khusus yang dilengkapi himbauan-himbauan bahayanya merokok.
 - b. Posyandu Lansia
Memberikan layanan medis berupa medical check up untuk anggota DWP dengan didampingi dokter yang juga merupakan anggota DWP serta dilakukan saat pertemuan rutin
6. Siaga ekonomi mandiri, merupakan upaya DWP untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, keluarga dan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif dan kreatif. Dengan implementasi Siaga Ekonomi Mandiri ini diharapkan dapat meningkatkan SDM, professional, menciptakan lapangan kerja, serta memasyarakatkan kehidupan berkoperasi. Beberapa

kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan bimbingan teknis, lomba-lomba, pelatihan, ceramah, pameran, mengadakan fasilitasi dan penandatanganan MoU dengan pihak-pihak terkait. Selain pelatihan pembuatan produk, penandatanganan MoU dengan dinas perindustrian dan perdagangan diperlukan agar pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif anggota di lingkungan DWP berjalan berkelanjutan dan maksimal, Diperlukan juga pendampingan dalam perolehan hak merek dan desain logo.

7. Siaga sosial, adalah upaya yang dilakukan DWP untuk menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian kepada sesama di kalangan staf dan karyawan termasuk keluarganya terhadap masyarakat yang kurang mampu, anak, dan bayi terlantar, cacat, dan terkena bencana. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka Siaga Sosial adalah:
 - a. Mengadakan baksi sosial setiap peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan bekerjasama dengan organisasi sosial PMI, *Lions Club*, RSUD dan klinik kesehatan. Kegiatan sosial meliputi kegiatan donor darah, pemberian obat gratis, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, dll.
 - b. Dalam rangka HUT Dharma Wanita Persatuan juga diadakan acara bakti sosial pemeriksaan kesehatan umum, mata, THT, hingga mamografi untuk anggota DWP di instansi masing-masing.
 - c. Kegiatan bakti sosial dalam rangka bulan Ramadhan juga gencar dilakukan seperti pemberian paket-paket sembako bagi panti asuhan, pembagian takjil gratis, hingga pelaksanaan ceramah agama dan halal bihalal.

Salah satu upaya mengatasi keterbatasan dana adalah dengan menjalin kerjasama multipihak baik dengan instansi, organisasi maupun swasta yang bisa memungkinkan tujuan organisasi tetap berjalan, hal ini sesuai dengan pernyataan informan

“Kerjasama multipihak saling menguntungkan, adanya kepedulian antar anggota organisasi, hingga peningkatan pendapatan ekonomi karena peningkatan ketrampilan” (GHT, 25/08/22).

Kerjasama dengan instansi lain yang memiliki sumber pengetahuan juga dapat menjadi pilihan ideal karena tidak harus mengeluarkan pendanaan yang besar karena biasanya setiap instansi telah memiliki program untuk sosialisasi dan memang diwajibkan untuk mensosialisasikan pada masyarakat. Sebagai contoh kerjasama DWP Provinsi dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk dapat sosialisasi masalah keluarga berencana, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat mengikuti pelatihan ketrampilan secara gratis sampai dengan sosialisasi perijinan produk industri rumah tangga, hingga dengan DP3AK (Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan untuk dapat mengikuti sosialisasi masalah kesetaraan gender dan kdrt rumah tangga.

“Strategi DWP untuk dapat menciptakan sumber daya manusia unggul di lingkungan organisasi adalah dengan melakukan kerjasama multipihak terutama dengan Lembaga pemerintah dan pihak luar yang berkompeten” (RS, 12/02/23)

“Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan yaitu mendukung program pembangunan di berbagai bidang yang disesuaikan dengan program pemerintah dengan melalui sinergi, sinkronisasi, kerja sama, perencanaan, pelaksanaan antara program kerja DWP dan program kerja SKPD” (GHT, 25/08/22).

Dengan menyelaraskan program kerja Dharma Wanita Persatuan dengan program pemerintah maka semakin menegaskan salah satu peran organisasi yaitu sebagai mitra pemerintah dalam membantu tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana strategik DWP tahun 2019-2024.

Informan lain mengungkapkan akan lebih baik bila ada dukungan yang maksimal dari pemerintah sebagai mitra kerja DWP

karena diperlukan keterpaduan program kerja organisasi dengan pemerintah.

“Faktor pendukung adalah dukungan dari pemerintah sebagai mitra kerja DWP, dukungan pendanaan dari APBD dan keterpaduan program antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Dharma Wanita Persatuan.

Hal lain diungkapkan oleh informan yang menyebutkan hal yang paling utama sebagai faktor pendukung adalah sumber daya manusia dan pengurunya. Dibutuhkan kerjasama yang kompak, kesatuan tujuan serta saling mendukung untuk kesuksesan setiap program DWP.

“Faktor utama pendukung pelaksanaan kegiatan DWP adalah tersedianya sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia dan pengurus” (FBS,27/02/23).

Faktor pendukung dan penghambat kegiatan organisasi DWP lainnya juga diungkapkan oleh informan yang adalah anggota luar biasa di DWP Provinsi Jawa Timur.

“Faktor pendukung organisasi ini adalah pendanaan, peran penasehat, dan kepemimpinan ketua DWP sedangkan faktor penghambatnya adalah dana yang terbatas, belum lagi peran suami kepada istri yang terkadang kurang mendukung kegiatan, dan anggota serta pengurus yang tidak bisa membagi waktu dengan baik”

Berdasarkan keterangan diatas terungkap bahwa selain masalah pendanaan, keterbatasan pelaksanaan kegiatan juga bisa disebabkan oleh peran suami yang kurang mendukung istri untuk berkontribusi pada organisasi, bisa disebabkan karena lebih mengutamakan menjaga anak dirumah atau juga anggota sendiri yang tidak bisa membagi waktu seimbang antara urusan rumah tangga, karir dan organisasi sehingga keberadaan organisasi ini dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan.

Manajemen waktu diperlukan bagi anggota agar selain mengurus rumah tangga tetapi juga memiliki waktu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilannya. Pertemuan rutin yang diadakan satu kali dalam sebulan dirasakan tidak berlebihan

sehingga diharapkan anggota maupun pengurus dapat meluangkan waktu meskipun hanya untuk bersilaturahmi.

“Tersedianya anggaran untuk kegiatan adalah pendukung, sedangkan penghambatnya bisa jadi karena pergantian pengurus” (S,10/02/23)

Pergantian pengurus yang terjadi sewaktu waktu dan ditengah tengah berjalannya program kerja menjadi sebuah kendala tersendiri karena membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa menyesuaikan dengan pengurus baru. Kebijakan maupun kebiasaan yang telah ditetapkan oleh ketua pengurus yang lama dan dilaksanakan oleh pengurus di bawahnya bisa jadi berubah sesuai dengan arahan ketua pengurus yang baru.

Diperlukan pengklasifikasian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar organisasi dapat memfokuskan pada strategi mengembangkan organisasi dengan maksimal agar tidak hanya berjalan ditempat dan minim inovasi, regenerasi harus dilakukan agar tidak hanya orang yang sama yang menguasai dan memahami organisasi.

Terkait dengan kekuatan dan kelemahan organisasi Dharma Wanita Persatuan dapat dirangkum dalam *Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat* (SWOT) dengan gambar di bawah:

Tabel 6.2 SWOT DWP dari Data Primer dan Sekunder

Kekuatan	Kelemahan
Jumlah sumber daya manusia yang besar Jangkauan wilayah yang luas Program kerja yang menarik Unit usaha cukup banyak	Pendanaan yang terbatas Pengelolaan yang kurang profesional Tertib administrasi yang kurang maksimal Sistem informasi yang memudahkan
Peluang	Ancaman
Program kerja yang menarik Kerjasama multipihak Unit usaha yang tersebar Potensi sumber daya yang beragam dari daerah	Regenerasi tidak berjalan dengan baik Unit usaha tidak berkembang Organisasi kurang menarik untuk diikuti anggota Organisasi berjalan stagnan

Sumber: Penulis, diolah

Seperti dapat dilihat digambar diatas bahwa secara internal, kekuatan dan peluang yang ada sangat besar karena dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi cukup besar ditunjang dengan unit usaha yang beragam namun harus diimbangi dengan dukungan pendanaan dari instansi terkait serta regenerasi yang berjalan optimal agar organisasi dapat berkembang kearah yang lebih maju. Menanamkan cinta organisasi harus sedari dini, maka anggota sebaiknya banyak dilibatkan dengan menggali potensi yang ada didalam. Menjadi sebuah permasalahan apabila suatu organisasi dianggap tidak lagi menarik dan berjalan stagnan maka regenerasi yang ideal akan terhenti dan organisasi berjalan stagnan.

Model Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdapat beragam pendapat dari informan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat untuk kemajuan organisasi tapi mayoritas menyatakan organisasi sudah berjalan cukup ideal hanya diperlukan penyempurnaan agar mencapai tujuan organisasi sesuai jaman.

“Tantangan dalam menjalankan organisasi setiap waktunya pasti ada tapi berusaha diminimalkan karena selalu berpegang pedoman dengan visi misi DWP yaitu visi menjadi aparatur sipil negara yang professional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa sedangkan misinya mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan global” GHT (25/08/22).

“Pengelolaan organisasi yang sekarang cukup ideal tapi tetap melihat dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada ke depan dengan tetap berpedoman dari anggaran dasar anggaran rumah tangga serta kebijakan pemerintah dan berasaskan Pancasila” (GHT,25/08/22)

Grant (1988) dalam artikelnya *Women as Manager: What they can offer to Organization* menyatakan bahwa terdapat enam hal yang

harus diperhatikan dalam menunjukkan eksistensi wanita yaitu pertama *communication and cooperation* dimana perempuan lebih cenderung bergantian dalam mengungkapkan pendapat, kedua *Affiliation and Attachment*, ketiga *power* yaitu perempuan cenderung menaikkan kekuatan memberi perhatian dan kasih sayang sedangkan pria dengan tindakan agresif, keempat *Physicality* dimana pendirian bergantung kesempurnaan fisik namun terkadang perempuan cenderung memiliki rasa kurang percaya diri dan rapuh serta mengedepankan emosi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa “Tipe kepemimpinan yang paling tepat untuk organisasi adalah yang aktif berorganisasi, ramah, dan mudah untuk berkomunikasi” (S,10/02/23).

Sesuai dengan teori Grant (1988) bahwa diperlukannya kepemimpinan yang komunikatif dan mudah untuk diajak bekerjasama dalam menjalankan organisasi dengan ideal. Hal ini dimaksud dengan berbagai latar belakang anggota, tingkat Pendidikan hingga dinamika dan keterbatasan yang ada di organisasi maka diperlukan lisan yang komunikatif dan mengayomi dari pimpinan.

“Menurut saya model pengelolaan yang ideal adalah organisasi yang mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama artinya organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri sendiri tetapi untuk kepentingan bersama anggotanya bahkan masyarakat” (GHT,25/08/22)

Organisasi akan selalu mengalami perubahan karena tuntutan kebutuhan serta kemajuan jaman agar tidak menjadi organisasi yang stagnan dan tak menarik dimata anggotanya karena organisasi yang ideal adalah organisasi yang menginginkan kemutakhiran dan tidak ingin tertinggal dengan organisasi lainnya karena perubahan dimulai juga dari individunya (Winardi,2018).

“Harapan saya organisasi melalui anggotanya harus dapat memberikan dorongan dan kontribusi kepada suami agar dapat

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat” (GHT,25/08/22)

Hal ini sesuai dengan pandangan Newstrom (2011,197) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan orang secara mental dan emosional dalam situasi kelompok dan berbagi tanggung jawab terhadap kelompok tersebut. Efektifitas organisasi juga akan terbentuk dari sistem yang saling mempengaruhi serta memperoleh dukungan dari individu/perorangan yang bekerjasama dalam kelompok yang terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan. Harapan informan agar melalui organisasi, maka anggota dapat senantiasa mendukung kinerja suami agar mencapai prestasi terbaik sebagai abdi masyarakat.

“Dharma Wanita Persatuan juga harus dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada anggotanya agar bisa melihat dan mengetahui tantangan-tantangan serta mengikuti perkembangan jaman” (GHT, 25/08/22)

“Dharma Wanita Persatuan juga harus dapat berkontribusi dalam melindungi, memberdayakan, memajukan kaum perempuan utamanya para istri aparatur sipil negara yang memerlukan pendampingan, pembinaan, motivasi serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anggotanya” (GHT,25/08/22)

Hal ini sesuai dengan pendapat McShane dan Von Glinow dalam Wijaya (2017,11). Bahwa perilaku individu dapat terbentuk dari beberapa hal seperti Motivasi, kemampuan, hingga persepsi yang mana motivasi mencerminkan kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi intensitas dan kekuatan orang tersebut, sedangkan kemampuan merupakan kecerdasan alamiah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan persepsi adalah kaitan terhadap peran diperlukan untuk mewujudkan pekerjaan dengan baik

“ada beberapa tantangan organisasi DWP yang akan berbeda sesuai dengan eranya, yang mana saat ini harus dihadapi serta menyesuaikan: 1. Era disrupsi: era yang merubah aktifitas nyata menjadi aktifitas maya, 2. Era globalisasi: era hadirnya teknologi informasi membuat dunia ada didalam genggaman yang memberikan pengaruh positif



VIII

PENUTUP

Kajian kajian ini menggunakan pendekatan interpretif, meletakkan pemahaman pada suatu fenomena dengan membangun makna dari pengalaman objek dari para informan yaitu para Ketua DWP Provinsi, pengurus serta staff administrasi DWP Provinsi Jawa Timur mengenai bagaimana eksistensi organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan, apakah peran para pengurus organisasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan organisasi.

Organisasi Dharma Wanita Persatuan dapat menjadi organisasi yang besar sesuai visi dan misi. Pentingnya komunikasi dengan anggota Dharma Wanita Persatuan dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan anggota untuk meningkatkan partisipasi kehadiran dalam rangka peningkatan SDM dan kesejahteraan anggota sesuai dengan tujuan DWP serta dalam penyusunan program kerja harus bersinergi dengan program pemerintah sehingga organisasi dapat lebih bermanfaat bagi anggota, keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya serta mampu mendukung percepatan terwujudnya program pemerintah. Diperlukan komitmen serta kekompakan dan cinta organisasi dari semua anggota dan pengurus untuk Bersatu dan bekerjasama dalam rangka memajukan organisasi DWP serta menjaga citranya sebagai organisasi istri aparatur sipil negara yang bermartabat dan professional. Informasi yang akurat dan berharga dari setiap bidang tentang program kerja dengan kegiatan yang kreatif

dan inovatif diharapkan dapat memberi dorongan dan semangat bagi setiap organisasi.

Permasalahan dana organisasi adalah masalah yang cukup klise dialami dalam sebuah organisasi kemasyarakatan yang hal tersebut tidak bisa dijadikan penghambat dalam menjalankan organisasi karena ada banyak cara kemandirian pendanaan yang bisa dilakukan seperti pendirian toko, koperasi, kantin hingga unit usaha lainnya. Diperlukan pula pemahaman manfaat kemitraan DWP dengan instansi pemerintah, swasta dan lainnya agar bisa menekan pembiayaan kegiatan dan tetap mampu memberikan informasi pengetahuan berharga pada seluruh anggota.

Meningkatkan peran perempuan di DWP agar siap di era 4.0 serta siap menghadapi tantangan global sehingga para anggota dan keluarga DWP mampu mengembangkan potensi diri melalui program prioritas DWP sehingga mampu mendukung organisasi DWP menjadi *center of excellence* dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga serta dapat ikut berperan serta dalam kemajuan peradaban dunia.

Ketua organisasi DWP di instansi dapat semaksimal mungkin dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan meski harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang disesuaikan batas kemampuan masing-masing institusi. Hasil yang baik dan optimal dapat diperoleh dengan memantapkan dan meningkatkan sumber daya anggota serta menjalin kerjasama dengan banyak pihak agar organisasi dapat berdaya guna tinggi untuk anggota, keluarga dan masyarakat. Semua hasil yang baik tentunya dapat dicapai berkat kerjasama yang didasari rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara anggota dan pengurus organisasi Dharma Wanita Persatuan di setiap instansi dan wilayah.

Beberapa saran terkait dengan kajian ini untuk Organisasi Dharma Wanita Persatuan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kegiatan dalam pelaksanaan program kerja yang kreatif, produktif, dan inovatif untuk menggeliatkan kegiatan organisasi Dharma Wanita Persatuan agar terwujud organisasi yang berkualitas, modern, dan professional sehingga dapat berperan aktif dalam memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa. Langkah permulaan menggali potensi internal anggota sehingga ketua organisasi selain dapat mengetahui potensi aggotanya juga dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada dan mendahulukannya daripada eksternal. Sebagai contoh perlunya mengisi pertemuan rutin dengan narasumber dari anggota DWP di instansi itu sendiri seperti berbagi ilmu dari tenaga kesehatan, tenaga pengajar, sampai keahlian lainnya. Terselenggaranya acara yang bentuknya tatap muka langsung secara rutin sehingga lebih mengakrabkan sesama anggota seperti pertemuan berkala, lokakarya, seminar, pelatihan, atau kunjungan kerja sehingga memudahkan proses sosialisasi program atau kegiatan.
2. Perlunya memanfaatkan media sosial secara maksimal karena tentu pembentukan citra positif di masyarakat salah satunya adalah dengan media digital baik dari Instagram, berita online, website resmi intansi hingga media sosial lainnya agar terbentuk stigma positif dari masyarakat berkaitan dengan kegiatan DWP. Pengembangan potensi anggota dalam perkembangan teknologi informasi perlu ditingkatkan sebagai upaya mendukung organisasi menjadi *center of excellence* dan berbasis data. Terbangunnya komunikasi timbal balik antara seluruh anggota DWP melalui jaringan teknologi informasi seperti website sehingga anggota dapat mengikuti perkembangan organisasi dari mana saja. Dengan mempublikasikan segala kegiatan positif dari organisasi diharapkan dapat merubah pandangan secara umum yang mana organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang penuh kegiatan bermanfaat, sosial dan mengikuti perkembangan jaman dengan isu-isu terkini. Hindari



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S., Hassan, S. S., Mohamed, N., & Yulia, S, 2021, Women and Leadership : Ability and Qualification. *Linguistica Antverpiensia*, 2(2), 2782–2787.
- Abidin. Z, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h 33.
- Ade Irma Khairani dan Wan Rajib Manurung, 2019, *Metodologi Kajian Kualitatif Case Study*. Trans Info Media Jakarta.
- Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
- Agranoff, Robert dan Michael McGuire, 2013. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*, Whashington, D.C: Georgetown University Press
- Ahdiah, I, 2013, Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academica*, 05(02), 1085–1092.
- Akhter, R and K. B. Ward, 2009, Globalization and Gender Equality: A Critical Analysis of Womens Empowerment in The Global Economy, Perceiving Gender Locally, Globally, and Intersectionally, *Emerald Group Publishing*, UK.
- Ali. Y, 2017, *Reformasi birokrasi TNI dan kebijakan tunjangan kerja*, Jakarta, lembaga kajian pembangunan dan pelatihan sumber daya manusia.
- Ambarwati, A.2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*, Media Nusa Creative.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan, *Masa Bakti 2019 – 2024*.

- Anwar, M. Zainal, 2013, Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol 8, No. 1.
- Andersson, J, 2017, Digital Transformation, Moderna Affarsystem, April 2017.
- Ashraf S, W Ahmad, dan A. A, 2012, Perceptual study of behavioral implication of usage of ICT for sustainable e-Governance in Rural Indi. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 2(4), 179–183.
- Aslichati, L. 2011, Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol 7, No.1.
- Arrorag, D. L. C, 2017, *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Mineapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Skripsi. Mahasiswa Program Studi Administrasi.
- Alwy. M. A, 2022, Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital melalui Lensa Manajer Sumber Daya Manusia Generasi Berikutnya, *Sibatik Journal, Jurnal Ilmiah bidang sosial ekonomi budaya teknologi dan pendidikan*, Vol. 1, No. 10, E-ISSN: 2809-8544.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bartunek, J. M and John. R. Austin, Theories and Practices of Organizational Development, John Wiley and Son Inc.
- Banerjee, S. S. Alok and B.George, 2020, Determinants of Women Empowerment as Measured by Domestic Decision Making: Perspective From A Developing Economy, *Advance Issues in the Economics of Emerging Markets*, Vol 27, Emerald Publishing Limited
- Beauvoir, Simone de, 2003, *The Second Sex: Fakta dan Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Promothea.
- Bodgan, R. dan S. Taylor: 1975. *Introducing to Qualitative Methods*. New York: A Wiley Interscience Publication.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K, 1982, Qualitative Research, In Education. Allyn and Bacon.

- Bungin. B, 2007, *Kajian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Covey, S.R. 1989. *The Seven Habits of Hifhly Effective People*, Simon and Schuster New York
- Craig L and Sawrikar P, 2009, *Work and Family: How does the gender balance change as children grow? Gender, work, and Organization*, Blackwell Publishing Ltd 16(6), 684-709, Melbourne.
- Creswell, John. W, 2017, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, J. W, 1998, *Qualitative Inquiry: Chosing Among Five*, Sage Publications.)
- Cucu, S., Budi, M. M., dan Mulyana, A, 2019, Pengarusutamaan gender dalam pengembangan sistem pendayagunaan zakat melalui modal usaha bergulir di desa Sindanglaka kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49 (2), 311-319.
- Cohut, M, 2018, What are the health benefit of being social medical news today, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/321019.php>
- Dade, M, 2020, Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi Dharma Wanita, *Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 14, No.2.
- Dagun, S. M, 1997, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Dandona, A. 2015, Empowerment of Women: A Conceptual Framework, *The International Journal of Indian Psychology*, Vol 2, Issue 3. India
- David W. Pitts dari University of Georgia, (2005), Leadership, Empowerment, and Public Organization, *Review of Public Organization Personnel Administration* Vol.25, No. 1.
- Detik.com, 2020, *Tentang Jumlah Aparatur Sipil Negara*, 28 Juni pukul 18.00.
- Devlin M. J, Jennifer. T, Surabhi. J, Keon. S, and Ronetta. M, 2021, Social Existence Theory, *Journal of humanistic counseling*,

volume 60, by the American Counseling Association, DOI: 10.1002/johc.12149.

- Devanty, C. P., Nyoman, S., 2017, Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 6, No.4. Bali
- Devi, S., Shinta, F. Hapsari, 2018, Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan Wanita dan Keluarga di Kelurahan Ciracas, *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 4, No 3, Jakarta.
- Devereux, L, 2017, Corporate identity and social media: existence and extension of the organization, *International studies of management and organization*, vol.47, issue 2 corporate identity and corporate branding, <https://doi.org/10.1080/00208825.2017.1256161>
- Donald, P., Rogers, 2012, *The Encyclopedia of Human Resource Management*, page 403, John Wiley and Son, Inc, Pennsylvania, USA
- Drucker, P. 1954. *The Practice of Management: A Study of the Most Important Function in America Society*. New Yor: Harpers College Press.
- Duha, T, 2018, *Perilaku Organisasi* (1st ed.). DEEPUBLISH.
- Echols, John. M, dan Shadily, Hassan, 1980 *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta:Gramedia, halm. 380.
- Executive Summary Indonesian Youth in The 21st Century, United Nations Funds For Population Activities (UNFPA).
- Fariyah, I, 2015, Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga Studi Kasus Keluarga nelayan, di Brondong, Lamongan, Jawa timur. *Palastren*, 8(1), 145–164.
- Fhahiriyah, N. Nabillah, Listyani, R.H, 2012, Eksistensi istri TNI Angkatan Laut, *Journal of Sociological Studies Paradigma*, Volume 07. Nomor 04, Universitas Negeri Surabaya.
- Fatah. M, 2020, Empowerment of Women Through Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Family Welfare and Empowerment Organization) in the Family Income

- Development Program in Banjarbaru City, *European Journal of Political Science Studies*.
- Fatchan, A, 2013, *Metode Kajian Kajian Kualitatif, 10 Langkah Kajian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*. Universitas Negeri Malang Press.
- Fendt, T. C, 2010, *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Universitätsverlag de Technischen Universität.
- Fiedler, 2002, *Critic, Provocateur, Pop Culture Guru*, page 111, McFarland & Company, Inc, Publishers, North Carolina.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1987. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses* Jilid 1, Edisi 5, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Grant, 1988, *Women as Managers: What They Can Offer to Organization*.
- Gray, S. T, 1996, *The Art of Collaborative, Association Management*, 48, (2), 202.
- Ghony dan Almanshur, 2012, *Metodologi Kajian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media.
- Harahap, E. Febrina, 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2*. Padang.
- Harthanti. D dan Huldya. S, 2016, *Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi: Studi Kasus Gabungan Organisasi Wanita di kabupaten Lombok Timur*
- Hasan M. dan M. Azis, 2018, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Pustaka Taman Ilmu, Makasar.
- Hasan, F. Hasin, H. Musa, 2018, Women Empowerment Model: Strategies to Overcome Challenges, *Journal of Fundamental and Applied Science, Malaysia*.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2016, *Manajemen Sumber daya manusia*. Edisi revisi. PT Bumi Aksara., Jakarta

- Hasil Musyawarah Nasional, 2019, *Dharma Wanita Persatuan*
- Hikmat, Harry, 2010, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Humaniora, Bandung.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6191882/ri-bakal-kecipratan-bonus-demografi-ini-3-tantangan-besarnya>
- <https://tirto.id/dharma-wanita-riwayatmu-kini-bxGu>
- <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/dharma-wanita-sebagai-identitas-patriarki>
- Idham N. A dan Dwi. S, 2019, Peran Organisasi Sosial Preman Super dalam Pemberdayaan Perempuan di Malang Raya, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*.
- Indrayana T Faradiba, M. Insan, R, B. Cahyo. C, 2023, Pemnafaatna media sosial Instagram sebagai sarana eksistensi organisasi pemuda berkain Surabaya, *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (Semakom) Vol.1, No.1, Untag Surabaya*
- Jacobs, D. C, 2004, A Pragmatist Approach to Integrity in Business Ethics, *Journal of Management Inquiry*”, Vol. 13 Issue 3, pp 215-223.
- Jamal, T.B., & Getz, D, 1995, Collaboration Theory and Community. *Tourism Planning. Annals of Tourism Research, 22 (1)*.
- Kabeer, N, 2017, *Women ’ s Economic Empowerment and Inclusive Growth : Labour Markets and Enterprise Development By Naila Kabeer GrOW Working Paper Series. 1–65*.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (online) available at: <http://kbbi.web.id/dekat>. (diakses 30 April 2023).
- Kaifi, B.A., Nafei, W.A., Khanfar, N. M., & Kaifi, M. M, 2012, *A multi generational workforce: Managing and understanding Millennials*.
- Karwati, Et.Al, 2018, Women Empowerment to Build Entrepreneurshi, *Journal of non formal education*.
- Komalasari, N. Susantinah, 2021, *Women Empowertment*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

- Kusuma, R, 2021, Jurnal Kajian Gender dan Anak. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak Vol.*, 05(2), 147–170.
- Kuswarno, E, 1999, *Fenomenologi, Metode Kajian Komunikasi, konsepsi, pedoman dan contoh kajian*, penerbit Widya Padjajaran.
- Kierkegaard, Soren Aabye, 1983, *Fear and Trembling*, Princeton University Press: Princeton.
- Kusuma, 2019, Kesetaraan gender. *ペインクリニック学会治療指針* 2, 3(1), 1–9.
- Lailatul, M., & Ni'mah., C, 2015, Hubungan Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu dengan Wasting dan Stunting pada Balita Keluarga Miskin. *Media Gizi Indonesia*, 10(2015), 84–90. [https://doi.org/Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015: hlm. 84–90](https://doi.org/Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015: hlm. 84-90)
- Lestari, B. Retno, 2010, *Pemberdayaan Wanita Melalui Teknologi Informasi*, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi.
- Larkin, J, 2017, *Human Resource Digital Disruption: The Biggest Wave of Transformation in Decades*, *Strategic HR Review*, 16 (2): 55-59.
- Manembu, A. E., Desa, P., & Desa, P, 2017, PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Politico*, 6(1), 1–28.
- Malfoy, A. Z Duerre, Pengertian eksistensi dan trend, <http://www.scribd.com/doc/141645215/pengertian-eksistensi-dan-trend>
- Mardianah, 2017, *Gaya Hidup, dan Dharma Wanita*. 4(1), 1–14.
- Marditama T, C. Solihah, L. Fitria, S. S, 2021, *Women Empowerment (I)*. Zahir Publishing.
- Marthalina, 2018, Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*.
- Makridakis, S, 2017, The Forthcoming Artificial Intelligence revolution: Its impact on society and firms, futures, pp 1-15, 62.

- Menaka, 2017, Women Empowerment in India, *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, Vol.3 No. 4, Coimbatore, India.
- Miskiyah, N., Ridho, S. L. Z., Jauhari, H., & Purnamasari, K, 2021, Women Attribute and Household Level Factor on Women's Empowerment. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 36(2), 181. <https://doi.org/10.24856/mem.v36i2.2124>
- Morissan, 2017, *Metode Kajian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Milles, M.B, & Huberman, A. M, 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Sage.
- Myers. K, and Sadaghiani. K, 2010, *Millenials in the Workplace: A Communication Perspective on Millenials Organizational relationships and Performance*.
- Nasir, M., Riadi, S., Simatupang, H., & Putra, P. D, 2019, Peran Kelompok Wanita Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Kecil. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3351>
- Nata, A, 2020, *Pendidikan Islam di Era Millenial*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Nourgama, I Akbar dan Sulistiani, D, 2019, Peran Organisasi Sosial Preman Super dalam Pemberdayaan Pereampuan di Malang Raya, Egalita, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 14 no 1.
- Nichols. T, 2015, Understanding the Millenial Generation, *Journal of Business Diversity*, Vol. 15, No.1, Research Gate.
- Nurdewanto. B, Eny. Y, dan Ririn. S, 2015, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Desa Wisata PKK, *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*.
- Nurdiyana, L, 2021, *Pemberdayaan Perempuan melalui peran FPPI*. Pendidikan Indonesia, Medan.
- Peraturan Menteri PPN No.7, 2018, *Program Kerja Dharma Wanita Persatuan*.
- Peraturan Presiden No. 59, 2017, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGS)*.

- Purnamasari, D, 2016, Model Kepemimpinan Perempuan Di Era Wikinomics. *Jurnal Studi Gender*, 7(2), 313–344.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Raffi, J., Trivedi, M. K., White, L., & Murase, J. E, 2020, Work–life balance among female dermatologists. *International Journal of Women’s Dermatology*, 6(1), 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.ijwd.2019.07.001>
- Raharja, S. J, 2018, *Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Daerah Patahan/Sesar Koro Citarum*. Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik.
- Ramadanti. D, 2022, Eksistensi kelompok wanita tani “Mandiri Sejahtera” Studi kasus di desa Bojongmangu kabupaten Bekasi, *Judul Kusa Lawa, Vol.2, No.1*.
- Ramadhani, N, 2016, Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat. *Sosietas*, 6(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4245>
- Ramadhani, N. 2016, Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat, *Sosietas*, 6(2), doi: 10. 17509/sosietas, v6i2. 4245.
- Rapitasari. D, 2016, Digital Marketing Berbasis Aplikasi Sebagai Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan, *Jurnal Kebijakan Litbang Cakrawala*, Vol. 10, No. 2, Desember, Surabaya
- Rasmawati, 2014, Dharma Wanita Sebagai Identitas Patriarki, *Jurnal Perempuan*.
- Robbins S and T. Judge, 2015, *Organizational Behavior* (16th). Pearson Education, Inc.
- Robbins, P. S, dan Judge, T. A, 2012, *Perilaku Organisasi*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, M. V., Kerr, R. B., Hoddinott, J., Garigipati, P., Olmos, S., & Young, S. L, 2019, Role of Women’s Empowerment in Child Nutrition Outcomes: A Systematic Review. *Advances in Nutrition*, 10(6), 1138–1151. <https://doi.org/10.1093/advances/nmz056>

- Sartre, Jean Paul, 1972, *The Psychology of Imagination*, London, Methuen and Co, Ltd.
- Siahaan. A, Wahyudi. L.Zen, 2012, *Manajemen Perubahan: Telaah Konseptual, filosofis, dan praksis terhadap kebutuhan melakukan perubahan dalam organisasi*, Ciptapusaka Media Perintis, Bandung.
- Solihah, C., Mulyana, M. B., & Mulyana, A, 2019, Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 311. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2005>
- Souza, D. Mamatha, 2017, A Study On Sustainable Organisation Policies in Empowering Women, *ADITYA Institute of Management Studies and Research, Shodhaditya Research Journal Vo 4 Issue 2*, Mumbai University.
- Sugiarto, E, 2015, *Menyusun Proposal Kajian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono, 2009, *Metode Kajian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, T, 2016, Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2748>
- Sheperd, J, 2004, Social and Economic Transformation in The Digital Era, DOI: 10.4018/978-1-59140-158-2.ch.001
- Thalib. T, 2015, Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Monano Kecamatan Bone Bolango, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo, Vol. II, No.1*.
- Valiant, V, 2020, Instagram sebagai media eksistensi diri, Universitas Persada Indonesia 1 no 1, 1-79.
- Ventura, A. Maria, Lourdes. M, Cruz. C, 2021, Womens Empowerment, research, and management: Their Contribution to Social Sustainability, Sustainability, <https://doi.org/10.3390/su132212754>.

- Warsono, H., Astuti, R.S, Ardiansyah, 2002, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas TI*, Program studi doktor administrasi publik FISIP UNDIP, ISBN 978-623-5732-04-6, Semarang
- Wheatley, D., C. Lawton & I. Hardil, 2018, Gender differences in paid and unpaid work. In *Hidden inequalities in the workplace* (pp. 181-214). Palgrave Macmillan, Cham.
- Wijaya, C, 2017, *Perilaku Organisasi*, Lembaga Peduli Pengembangan
- Yadav, A, Jacoc, A, Veena. S, 2020, The Existensialism of digitalization era in Human Resources, *Mukt Shabd Journal*, Vol IX, Issue IV, April, ISSN No: 2347-3150
- Yam, J. H, 2020, *Manajemen Strategi* (1st ed.). Nas Media Pustaka.
- Zainal. M, 2013, Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan pada *Jurnal Sosiologi Reflektif*.



BIOGRAFI PENULIS

Diana Rapitasari lahir di Surabaya, pada tanggal 03 Desember 1982. Anak kedua dari dua bersaudara dari ayah Alm. Drs. Pied Yudhianto, MBA dan ibu Ratna Yulianie. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Empat Surabaya pada tahun 2001. Meneruskan studi strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dengan program studi manajemen di tahun 2001 dan menyelesaikan studi pada tahun 2005.

Studi lanjutan strata dua mengambil Magister Manajemen di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2006 dan menyelesaikan studi pada tahun 2009. Melanjutkan program Doktor Ilmu Manajemen di STIESIA Surabaya di Tahun 2019. Mempunyai pengalaman bekerja sebagai wiraswasta dan pengajar di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pemberdayaan PEREMPUAN di Era Digital

Eksistensi Pengembangan
Dharma Wanita Persatuan



Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dalam konteks Indonesia, peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi semakin mendapat perhatian, dan salah satu organisasi yang berperan aktif dalam hal ini adalah Dharma Wanita Persatuan (DWP). Buku ini, "Pemberdayaan Perempuan di Era Digital: Eksistensi Pengembangan Dharma Wanita Persatuan," mengeksplorasi bagaimana DWP, sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, beradaptasi dan berkembang di era digital untuk mendukung pemberdayaan anggotanya dan perempuan pada umumnya.

Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang baru bagi perempuan untuk mengakses informasi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Hal ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. DWP, dengan visi dan misinya, telah memanfaatkan TIK untuk memperluas jangkauan program-program pemberdayaan yang mereka miliki. Buku ini menguraikan berbagai inisiatif dan program yang telah dikembangkan oleh DWP untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, seperti pelatihan keterampilan digital, program literasi keuangan, dan pengembangan kewirausahaan.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengadopsi teknologi digital, seperti kesenjangan digital dan hambatan sosial-budaya.

litnus. Penerbit



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
litrasinusantara_
085755971589

Pendidikan

+17

